



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



LKJIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Hubungi Kami:

0274 - 552997

admin@pa-yogyakarta.net

www.pa-yogyakarta.go.id



Pengadilan Agama Yogyakarta



pengadilanagama.yogyakarta



PA_Yogyakarta



Pengadilan Agama Yogyakarta

LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

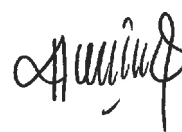
Yogyakarta, 18 Februari 2026

Pereviu I



Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Pereviu II



Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

LAMPIRAN II
 SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
 TANGGAL : 25 November 2025

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	V
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	V
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	V
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	V
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	V
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	V
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	V
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	V
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	V
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	V
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	V
		7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	V

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

No	Pernyataan	Check list	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	V
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	V
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	V
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	V
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	V
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	V
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	V
		9. Jika "Tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	V
		10. IKU dan IK telah SMART	V

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Pereviu I

Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Pereviu II

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	2
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
3. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
4. ISU STRATEGIS	5
5. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
1. VISI DAN MISI	10
A. VISI.....	10
B. MISI.....	11
2. TUJUAN DAN SASARAN STATEGIS.....	12
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.....	13
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
B. RENCANA KERJA.....	22
C. PERJANJIAN KINERJA.....	24
1. CAPAIAN KINERJA	25
2. REVISI PERJANJIAN KINERJA	26





BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
1. PENGUKURAN ORGANISASI	29
2. ANALISA CAPAIAN KINERJA	32
B. REALISASI ANGGARAN	64
C. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024	70
 BAB IV : PENUTUP	 75
KESIMPULAN	76
REKOMENDASI.....	78



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan segala rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu..

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 yang berisi tentang informasi pertanggung jawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2025 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2025.

Sehubungan dengan usaha penguatan Akuntabilitas Kinerja dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Pengadilan Agama Yogyakarta, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara umum capaian kinerja pada tahun 2025 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan pencapaian yang sesuai. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi,





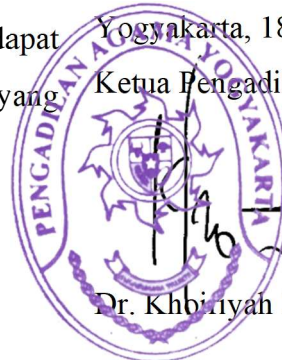
efektifitas, dan produktifitas kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta atas bimbingan dan arahnya serta semua pihak atas kerjasamanya yang baik. Dengan mengharap bimbingan Allah SWT semoga pelaksanaan tugas kami dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Aamiin.



Yogyakarta, 18 Februari 2026
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Dr. Khotimah Roihan, S.Ag.M.H





RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2025 termasuk kategori **'Berhasil'**. Dapat diartikan sukses memenuhi semua target yang ditetapkan di awal tahun dengan nilai rata-rata mencapai **114,30%**.

Hasil positif ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan Pengadilan Agama Yogyakarta tetap terjaga dan konsisten, sama baiknya dengan pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Adapun ringkasan capaian masing-masing indikator dapat disajikan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	99,15%	102,22%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100,00%	100,00%	100,00%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju` kepada para pihak	98,00%	100,00%	102,04%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100,00%	100,00%	100,00%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68,00%	100,00%	147,06%
		1.6	Persentase perkara yang menggunakan e-court	95,00%	100,00%	105,26%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41,00%	76,55%	186,71%
		1.8	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97,00%	100,00%	103,09%
		RATA-RATA CAPAIAN SASTRA 1				118,30%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	3,83	103,51%
		2.2	Persentase pengguna bantuan hukum	100,00%	100,00%	100,00%
		RATA-RATA SASTRA 2				101,76%



3	Terwujud manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71,00%	83,40%	117,46%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,00%	96,36%	103,61%
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75,00%	80,10%	106,80%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00	3,675	122,50%
		RATA-RATA CAPAIAN SASRA 3				122,59%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025						114,30%



BAB I

PENDAHULUAN



Latar
Belakang

Tugas Pokok
dan Fungsi

Struktur
Organisasi

Isu Strategis

Sistematika
Penyajian

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sebuah Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nornor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung secara umum khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang disinergikan dengan realisasi anggaran. Laporan ini merefleksikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029. Penyusunannya berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA.3/IX/2025 serta mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK :

Tugas pokok Pengadilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

FUNGSI :

- ✓ Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- ✓ Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya.
- ✓ Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kecuali keuangan perkara).
- ✓ Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- ✓ Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

ISU STRATEGI

Sebagai Lembaga Yudikatif yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Yogyakarta menghadapi tantangan transformasi digital, dinamika sosial yang kompleks, serta perluasan kewenangan ekonomi syariah. Adapun permasalahan utama/ isu strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya:

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, ditetapkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Tingkat penyelesaian perkara. Hal ini juga menjadi indikator utama Mahkamah Agung yang berkomitmen pada mandat konstitusionalnya dalam hal memutus perkara. Oleh karena itu, hal ini menjadikan target penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Langkah-langkah strategis yang diambil sebagai upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui:

- a. Penyederhanaan proses berperkara melalui pendaftaran perkara secara e-court
- b. Percepatan persidangan melalui e-litigasi dan penyelesaian perkara melalui mediasi
- c. Pemanggilan melalui panggilan tercatat dan e-summons, memangkas birokrasi, percepat proses serta pemanfaatan teknologi informasi
- d. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) baik untuk manajemen perkara internal dan eksternal
- e. Spesialisasi hakim dalam penyelesaian perkara tertentu seperti waris dan ekonomi syariah

2. Peningkatan integritas dan kualitas pelayanan

Sebagai upaya menjaga kepercayaan publik dan menjamin kualitas pelayanan, perlu diambil langkah-langkah penguatan aspek integritas dan pelayanan antara lain:

- a. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani
 - b. Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
 - c. Pelayanan terpadu satu pintu
 - d. Peningkatan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dengan adanya layanan Posbakum dan Pembebasan Biaya Perkara
 - e. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat
3. Peningkatan dukungan manajemen dan efektivitas pengelolaan anggaran serta tata Kelola organisasi

Dukungan manajemen dan efektivitas pengelolaan anggaran serta tata kelola organisasi merupakan aspek manajerial yang menggerakkan seluruh operasional Pengadilan Agama Yogyakarta. Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan dukungan manajemen ini antara lain:

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui diklat-diklat, sosialisasi, bimbingan teknis
- c. Peningkatan kualitas perencanaan dan realisasi anggaran berbasis kinerja
- d. Pengelolaan BMN secara optimal

SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran
- Tindak Lanjut Laporan LHE AKIP Tahun 2024

BAB IV Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



RENSTRA

PERJANJIAN
KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Agama Yogyakarta menyusun Rencana Strategis 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



VISI & MISI

1. Visi dan Misi

A. VISI

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi yang tertuang dalam Renstra tahun 2025 – 2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun visi dari Pengadilan Agama Yogyakarta adalah:

” Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta Yang Agung”

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :



- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
- Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tujuan dan Sasaran Strategi

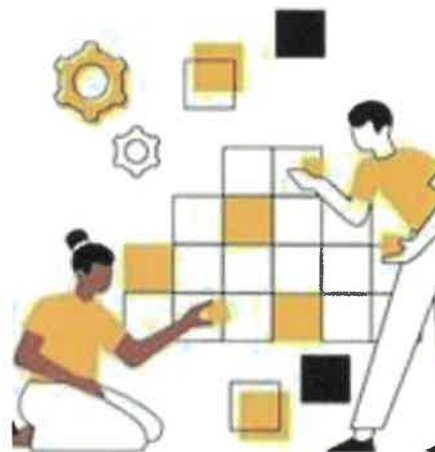
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan Visi dan Misi serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka ditetapkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan
- b. Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional



Sedangkan Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ditetapkan dan dapat diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pendekatan adaptif atas capaian kinerja tahun 2020-2024, maka sasaran strategis tahun 2025-2029 dirancang lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Tujuannya untuk memastikan indikator mencerminkan kualitas dan *outcome* yang nyata, maka ditetapkan sasaran strategis Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional



3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaannya dijabarkan uraiannya dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu:

a. Program Dukungan Manajemen

Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2025 dipergunakan untuk:

- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- 2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
 - Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
 - Langganan Daya dan Jasa
 - Pemeliharaan Kantor
 - Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
 - Rapat Koordinasi Internal
 - Konsultasi Ke Pusat/ Tingkat Banding

- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

- 1) Mediasi Melalui Mediator Eksternal Pengadilan
- 2) Layanan Pos Bantuan Hukum
- 3) Pembebasan Biaya Perkara

**FRAMEWORK RENSTRA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama
Yogyakarta Yang Agung

MISI

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
- Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

TUJUAN 1

Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan

TUJUAN 2

Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

SASARAN 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

SASARAN 2

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

SASARAN 3

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Hakim dan Kepaniteraan

Sekretariatan

Indikator Kinerja

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak
3. Persentase pengiriman petikan/putusan tingkat banding, kasasi dan PK
4. Persentase putusan yang diunggah
5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan
6. Persentase perkara yang menggunakan e-court
7. Persentase perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi
8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara

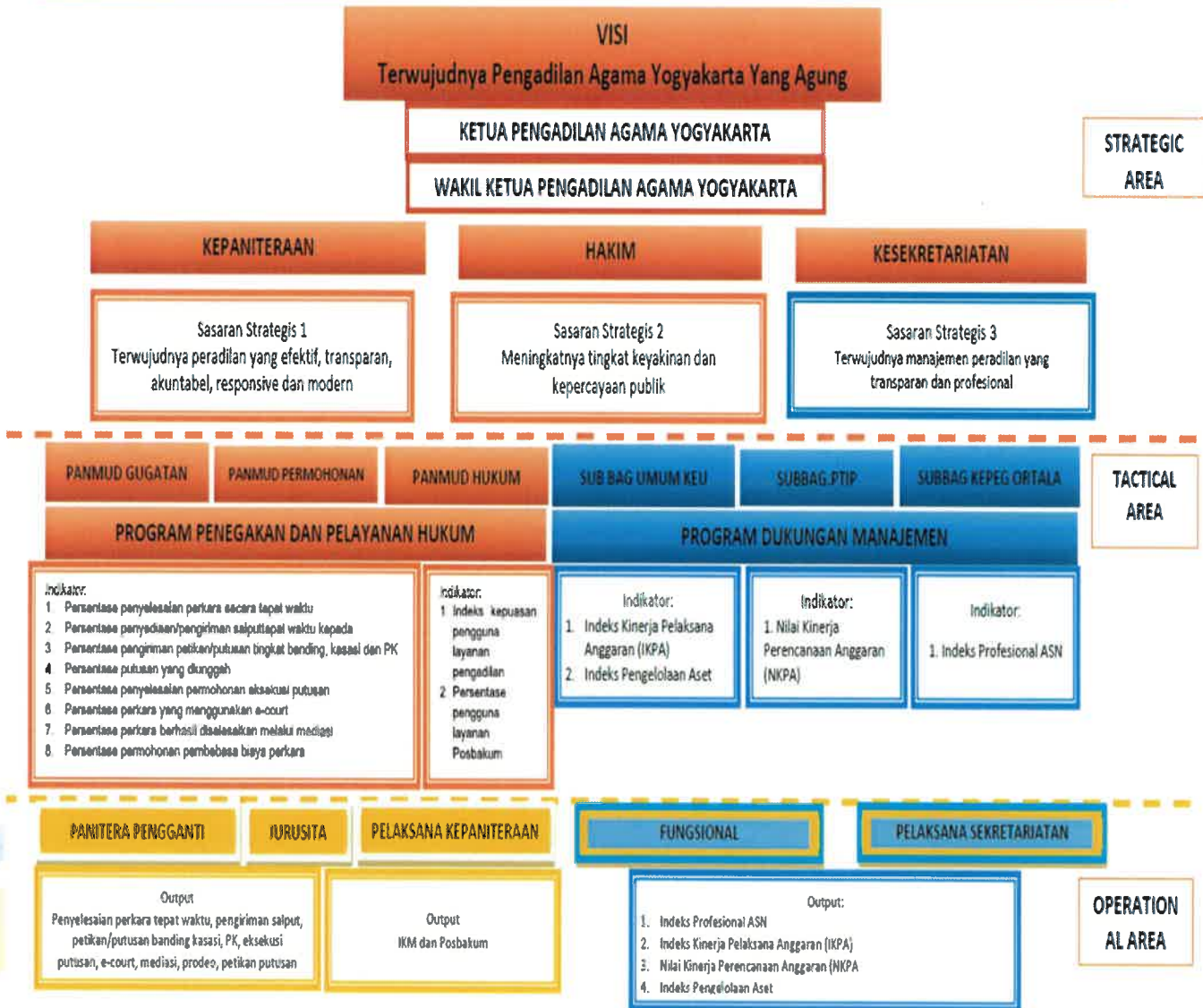
Indikator Kinerja

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
2. Persentase pengguna bantuan hukum

Indikator Kinerja

1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
4. Indeks Pengelolaan Aset

POHON KINERJA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025



4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Nomor : 1927/KPA.W12-A1/RA1.3/XI/2025
 Tanggal : 19 November 2025

INDIKATOR KINERJA (IK) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan				
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di mimitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima ditambah sisa perkara tahun sebelumnya <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>1.2. Persentase pervediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah Perkara yang diputus X 100%</p> <p>Catatan : Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai tersedianya salinan putusan pada SIPP.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah Pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju X 100%</p> <p>Catatan : Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi X 100%</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar hukum:</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.		
1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{jumlah permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.6. Persentase perkara yang menggunakan e-court	$\frac{\text{jumlah perkara yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{jumlah perkara yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional Dasar hukum: 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak</p>		
<p>2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</p>	<p>2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan</p>	<p><u>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</u></p> <p>Catatan : Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Triwulanan</p>
<p>Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</p>				
<p>3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</p>	<p>3.1 Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)</p>	<p>Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah No.8 Tahun 2019</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Tahunan</p>
	<p>3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p>	<p>Catatan : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) 	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan Aplikasi</p>

	<p>e. Deviasi hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)</p> <p>Dasar: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Penunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi capaian RO satker (30%)</p> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan (Aplikasi https://monet.kemendagri.go.id/)
3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara.</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-tadewa, SIMAn, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran

B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

Catatan: Indikator Kinerja Lainnya ditetapkan pada dokumen Indikator Kinerja (IK) satker, jika di satker tersebut terdapat kinerja lain yang terdapat pada SK Dirjen Badilag Nomor 2410//DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama (seperti: Indikator Penyelesaian perkara Jinayat, Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang diluar Gedung, Sidang Terpadu, icbat nikah bagi WNI diluar negeri)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan				
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan Biaya perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : 1. Pelaksanaan pemberian pembebasan biaya perkara mengacu kepada PERMA 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 2. Jumlah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara adalah perkara yang dibebaskan biayanya pada anggaran pengadilan atau DIPA (Prodeo DIPA)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	<p>$\frac{\text{Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilayani}}{\text{Jumlah pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : 1. Pelaksanaan pemberian layanan hukum (Posbakum) mengacu kepada PERMA 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 2. Layanan Posbakum, antara lain: a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advic hukum b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma 3. Jumlah pemohon dan pengguna layanan Posbakum adalah jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelesaian perkara tepat waktu (<= 5 bulan)	Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu	815 pkr	103.325.000
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%		Penyampaian Salinan putusan ke para pihak tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	822 pkr	
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%		pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu	Jumlah petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu	15 Pkr	
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%		Pengunggahan putusan pengadilan pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	822 pkr	
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%		penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah penyelesaian permohonan eksekusi putusan	1 Pkr	
		Persentase perkara yang menggunakan e-court	95%		Pendaftaran perkara secara e-court	Jumlah perkara yang didaftarkan secara e-court	805 pkr	
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%		Pelaksanaan mediasi melalui mediator	Jumlah perkara yang di mediasi	75 pkr	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	97%		Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	30 pkr	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala	Indeks kepuasan masyarakat	3,70	
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%		Perkara yang mendapat layanan posbakum	Jumlah perkara yang dilayani melalui posbakum	914 Org	
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71%	Dukungan Manajemen	Peningkatan profesionalitas ASN	Indek Profesional ASN	71%	10.491.074.000
		Nilai IKPA DIPA 01	93%		Kinerja pelaksanaan anggaran	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran	93%	
		DIPA 04	90%		Kinerja perencanaan anggaran	Indeks kinerja perencanaan anggaran	75%	
		Nilai (NKPA) DIPA 01	75%				60%	
		DIPA 04	60%		Kinerja kualitas tata Kelola BMN	Indeks pengelolaan asset negara	3,00	
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00						

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Yogyakarta Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%
5	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100%
		Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan	100%

1. CAPAIAN KINERJA

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

TRIWULAN I/II/III TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	99,01%	101,03%
		2. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	98,00%	98,51%	100,52%
		3. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,00%	99,34%	100,34%
		4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90,00%	94,83%	105,37%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		2. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30,00%	79,63%	265,43%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
		2. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100,00%	107,78%	107,78%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengaduan	1. Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	98,00%	100,00%	102,04%
5.	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	1. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100,00%	100,00%	100,00%
		2. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan laporan perkara bulan Januari-September 2025

2. REVISI PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (REVIU) Nomor : 1328/KPA.W12-A1/RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 13 November 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.
NIP. 195907061989031001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Dr. Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H.
NIP. 19740926 199903 2 001


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (REVIU)
Nomor : 1328/KPA.W12-A1/RA1.10/XI/2025
Pengadilan Agama Yogyakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%
		Persentase perkara yang menggunakan e-court	95%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	97%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%
3.	Terwujud manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75%
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 10.491.074.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 103.325.000,-

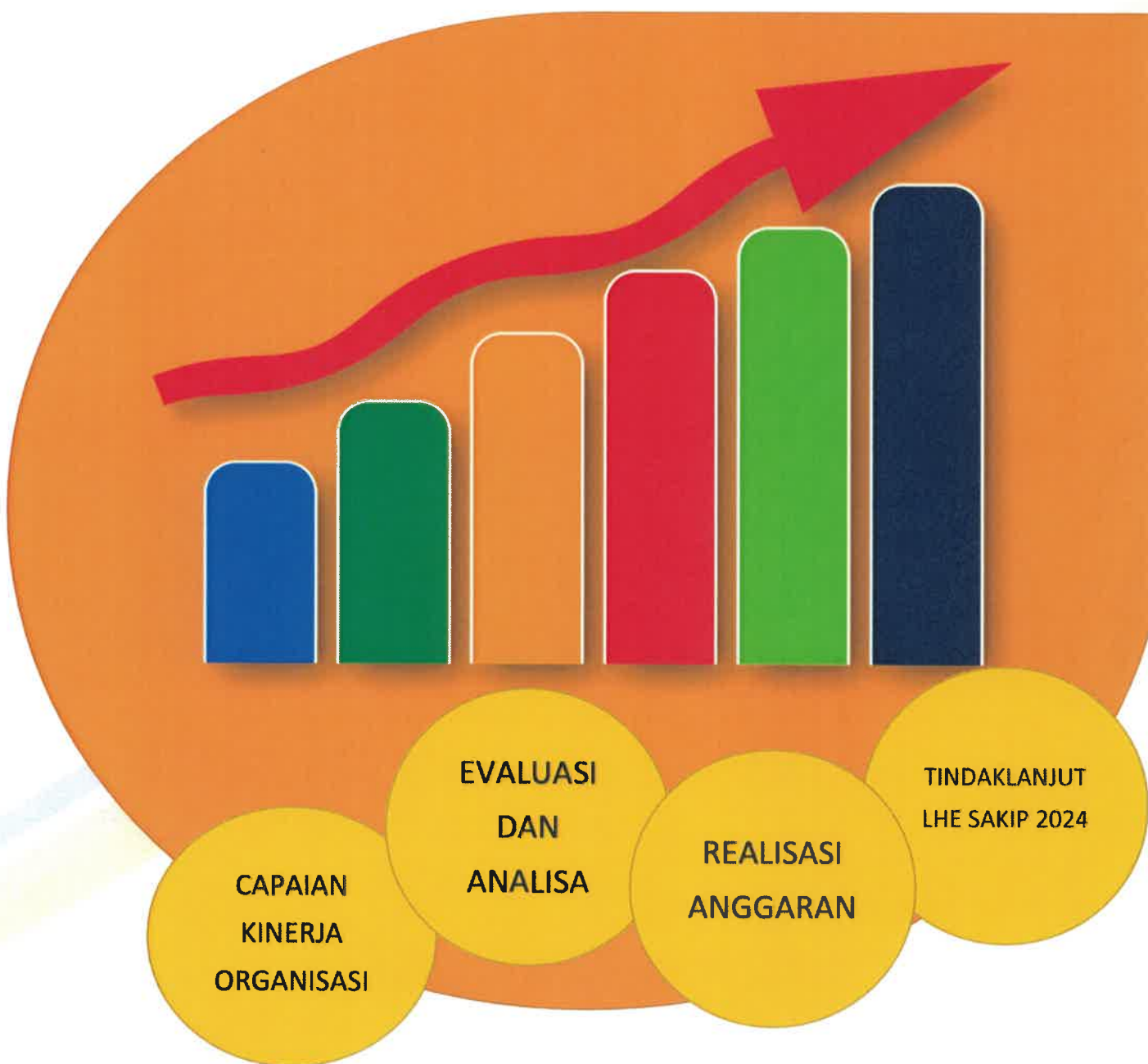
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 Yogyakarta

 Drs. J. Achmad Hanifah, M.HES.
 NIP. 195907061989031001

Yogyakarta, 13 November 2025
 Ketua,

 Dr. Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H.
 NIP. 19740926 199903 2 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini, dengan rumus perhitungan :

Penghitungan Capaian Kinerja $\left[\frac{R}{T} \right] \times 100$

Keterangan :

$R = \text{Realisasi}$

$T = \text{Target}$



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	99,15%	102,22%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100,00%	100,00%	100,00%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98,00%	100,00%	102,04%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100,00%	100,00%	100,00%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68,00%	100,00%	147,06%
		1.6	Persentase perkara yang menggunakan e-court	95,00%	100,00%	105,26%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41,00%	76,55%	186,71%
		1.8	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97,00%	100,00%	103,09%
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70
2.2	Persentase pengguna bantuan hukum			100,00%	100,00%	100,00%
3	Terwujud manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71,00%	83,40%	117,46%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,00%	96,36%	103,61%
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75,00%	80,10%	106,80%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00	3,675	122,50%

Kegiatan/Upaya/ Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target sebagai berikut:

NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1.	Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP	Masih terdapat penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan dikarenakan keragaman perkara	Sosialisasi lebih lanjut mengenai batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan SEMA.
1.2.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara dengan meningkatkan penggunaan aplikasi yang mendukung percepatan penyelesaian perkara. Monitoring upload Salinan putusan 	Penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dilakukan secara tepat waktu, hal ini dapat digunakan untuk meminimalisir adanya minutasasi putusan yang melebihi batas waktu.	Meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi pendukung persidangan guna menghasilkan penyelesaian perkara yang efektif dan tepat waktu.
1.3.	Menyampaikan pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu	Penyampaian petikan/amar putusan pada Tingkat Banding, Kasasi dan PK kepada pihak telah mampu diserahkan secara tepat waktu, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pihak berperkara mampu dilaksanakan secara utuh, dan melampaui target yang telah ditetapkan.	Memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pengiriman berkas Banding, Kasasi dan PK dan monitoring pengiriman secara tepat waktu
1.4.	Mengunggah putusan di direktori putusan (<i>one day publish</i>)	Penyampaian putusan pada laman direktori putusan, merupakan pemenuhan hak bagi pihak berperkara, sehingga informasi mengenai putusan perkara tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat, hal ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.	Monitoring harian terhadap pengunggahan putusan direktori putusan.
1.5.	Memeriksa kelengkapan permohonan eksekusi dan menindaklanjutinya	Penyelesaian permohonan eksekusi terhadap putusan telah dilaksanakan melebihi dengan target yang ditetapkan, hal ini mencerminkan bahwa setiap hak pihak berperkara mampu dilaksanakan dengan baik oleh pengadilan.	Sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi terkait mengenai sita eksekusi, jaminan, dan output lainnya mengenai eksekusi.

NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.6.	Mewajibkan berperkara secara ecourt	Penggunaan ecourt dalam perkara perdata agama telah dilakukan secara optimal, sehingga sudah tidak terdapat perkara yang didaftarkan secara manual.	Mensosialisasikan lebih lanjut mengenai penggunaan ecourt baik kepada pihak berperkara dan pihak internal peradilan, guna mengefektifkan persidangan.
1.7.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan yang mengatur tentang mediasi • Memonitoring pelaksanaan mediator secara berkala • Memberikan penghargaan terhadap mediator non hakim yang berkinerja terbaik (keberhasilan mediasi paling banyak) 	Proses perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi telah melebihi target yang dirumuskan, namun tetap harus dioptimalkan dengan strategi atau Upaya untuk mensosialisasikan mengenai mediasi kepada pihak yang berperkara.	Meningkatkan informasi digital mengenai mediasi, sehingga pihak mudah memahami dan mudah dimengerti.
1.8.	Memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	Dalam memenuhi hak dan kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan, telah diberikan sehingga hak dan kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu terpenuhi.	Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban administrasi kepada masyarakat kurang mampu mengenai hak mereka ketika berperkara di pengadilan
2.1.	Melakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadilan	Untuk meningkatkan kualitas layanan di Pengadilan Agama Yogyakarta, setiap pihak yang berperkara diperkenankan untuk mengisi survey kepuasan Masyarakat yang indeks akhir penilaian sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas layanan.	Meningkatkan sosialisasi mengenai pengisian Survey Kepuasan masyarakat baik kepada masyarakat, dan pegawai peradilan
2.2.	Memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat pencari keadilan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat pencari keadilan.	Dalam pemberian layanan kepada Masyarakat kurang mampu atau terpinggirkan sudah dapat dilaksanakan dengan baik	Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban administrasi kepada masyarakat kurang mampu mengenai hak mereka ketika berperkara di pengadilan
3.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventarisir dan mengupdate data Pendidikan, pelatihan, 	Keterbatasan penyelenggara diklat di lingkungan Mahkamah Agung dan	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventarisir kebutuhan diklat

NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<p>SKP dan kenaikan pangkat</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan izin belajar, usulan diklat dan kenaikan pangkat 	<p>kuota peserta diklat sehingga diklat tidak merata pengikutsertaannya.</p>	<p>masing-masing bagian dan jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan ke Badan Diklat atau Biro Kepegawaian Mengikuti diklat yang diadakan selain dari MA atas inisiatif sendiri
3.2.	<ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan anggaran rutin Menyesuaikan rencana penarikan dana Memonitoring penyerapan dan rencana Melaporkan progress fisik dan data kontrak tepat waktu 	<p>Adanya efisiensi anggaran dari Pusat karena keadaan ekonomi global berakibat pada keterbatasan dana pemeliharaan dan adanya pengeluaran diluar rencana sehingga merubah perencanaan dan berakibat pada deviasi halaman 3 DIPA</p>	<p>Meminimalisir belanja yang tidak terencana, mengurangi intensitas revisi POK dan skala prioritas kegiatan</p>
3.3.	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan kebutuhan riil Monitoring dan menyesuaikan rencana dan pelaksanaan (RPD) Mensosialisasikan DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan riil Usulan belum mengakomodir kebutuhan tiap bagian Perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran mengakibatkan tidak tercapainya output Belanja yang tidak terencana sehingga terjadinya deviasi halaman 3 DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisir kebutuhan/usulan dari masing-masing bagian Monev anggaran dilakukan secara berkala untuk mengambil keputusan revisi anggaran maupun output jika tidak dimungkinkan dapat tercapai Berkoordinasi dengan pengelola anggaran (KPA, PPK dan Bendahara) untuk meminimalisir deviasi halaman 3 DIPA
3.4.	<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan BMN Menyusun laporan BMN dan RKBMN Membuat laporan Wasdal Melakukan klasifikasi dan penghapusan BMN jika diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran pemeliharaan yang terbatas sehingga aset cepat rusak Terdapat aset yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan kondisi rusak 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan anggaran pemeliharaan sesuai kebutuhan riil dan data BMN Menginventarisir dan mengklasifikasikan BMN serta mengusulkan untuk penghapusan

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	99,15%	102,22%
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98,00%	100,00%	102,04%
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68,00%	100,00%	147,06%
1.6	Persentase perkara yang menggunakan e-court	95,00%	100,00%	105,26%
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41,00%	76,55%	186,71%
1.8	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97,00%	100,00%	103,09%

1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang pada pokok Suratnya menerangkan bahwa : “Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi.”

Dari jumlah perkara yang diterima tahun 2025 sebanyak 840 ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 44 perkara, maka jumlah perkara yang ditangani tahun 2025 sebanyak 884 perkara, dan perkara yang diputus pada tahun 2025 sebanyak 824 perkara, adapun sisa perkara tahun 2025 yang belum diputus sebanyak 60 perkara. Sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim pada tahun 2025 yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 817 perkara (99,15%). Sedangkan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 7 perkara (0,85%)

Hasil capaian kinerja pada indikator ini sebesar **102,22%**, diperoleh dari Realisasi dibanding Target yaitu 99,15% dibagi 97 %, maka catatan perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{817 \text{ Perkara}}{824 \text{ Perkara}} \times 100\% = 99,15\%$$

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu antara lain:

1. Monitoring capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu (≤ 5 bulan) dilakukan secara berkala

2. Spesialisasi hakim dalam penyelesaian perkara tertentu seperti kebendaan antara lain: waris, harta bersama dan ekonomi syariah
3. Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi dan e-litigasi

Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	2025	824	817	97,00%	99,15%	102,22%
	2024	812	807	98,00%	99,38%	101,41%
	2023	842	830	98,00%	98,57%	100,58%
	2022	916	885	99,00%	99,44%	100,44%
	2021	952	924	92,69%	98,27%	106,02%

Dilihat dari tabel perkembangan capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan yang relatif stabil dan menaik. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.

Grafik: Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2025



Tabel Penyelesaian Perkara tepat waktu selama Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara diselesaikan			
	Diputus sampai dengan 3 bulan	Diputus 3-5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum diputus lebih dari 5 bulan
Januari	37	3	1	-
Februari	68	5	2	-
Maret	48	4	-	-
April	42	6	-	-
Mei	60	16	-	-
Juni	60	5	1	1
Juli	80	7	1	1
Agustus	67	4	-	1
September	80	6	1	1
Oktober	60	6	-	1
November	62	7	1	1
Desember	78	6	-	2
Jumlah	742	75	7	-

Berdasarkan hasil pengukuran perbulan mulai Januari sampai dengan Desember atas sasaran, indikator, dan target pada revisi perjanjian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Januari	97,00%	97,56%	100,57%
			Februari	97,00%	97,33%	100,34%
			Maret	97,00%	100,00%	103,09%
			April	97,00%	100,00%	103,09%
			Mei	97,00%	100,00%	103,09%
			Juni	97,00%	98,48%	101,52%
			Juli	97,00%	98,86%	101,91%
			Agustus	97,00%	100,00%	103,09%
			September	97,00%	98,85%	101,90%
			Oktober	97,00%	100,00%	103,90%
			November	97,00%	98,57%	101,61%
			Desember	97,00%	100,00%	103,09%

1.2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 26 ayat (5) bahwa pengunggahan salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.

Indikator Kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100% dari jumlah putusan yang tersedia/terkirim tepat waktu ke dalam SIP pada satu hari setelah putusan dibacakan.

$$\frac{\text{Jml isi putusan diterima tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$$

Jml putusan

$$\frac{824 \text{ Perkara}}{824 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

824 Perkara

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan penyampaian salinan putusan dengan tepat waktu sebanyak 824 perkara dari total 824 perkara yang diselesaikan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian target ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Para pihak telah mendaftar akun e-court
2. Para pihak mendapatkan notifikasi WhatsApp dan email dari perkara didaftarkan hingga perkara Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Juru sita menyampaikan surat tercatat untuk para pihak yang tidak mempunyai akun e-court secara tepat waktu melalui Pos Indonesia

Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak oleh dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan disampaikan tepat waktu Tahun 2025	Jumlah Putusan Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu	2025	824	824	100%	100%	100%
	2024	812	812	100%	100%	100%
	2023	842	842	100%	100%	100%
	2022	885	885	100%	100%	100%
	2021	924	924	100%	100%	100%

Dilihat dari tabel penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak selama 5 (lima) tahun secara konsisten tercapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Yogyakarta mewujudkan peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran perbulan mulai Januari sampai dengan Desember atas sasaran, indikator, dan target pada revisi perjanjian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.2. Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Januari	100,00%	100,00%	100,00%
		Februari	100,00%	100,00%	100,00%
		Maret	100,00%	100,00%	100,00%
		April	100,00%	100,00%	100,00%
		Mei	100,00%	100,00%	100,00%
		Juni	100,00%	100,00%	100,00%
		Juli	100,00%	100,00%	100,00%
		Agustus	100,00%	100,00%	100,00%
		September	100,00%	100,00%	100,00%
		Oktober	100,00%	100,00%	100,00%
		November	100,00%	100,00%	100,00%
		Desember	100,00%	100,00%	100,00%

1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 28G ayat (6) bahwa pengadilan pengaju menyampaikan/memberitahukan salinan putusan kepada para pihak melalui SIP dan untuk pihak pembanding/terbanding yang tidak memiliki domisili elektronik, pemberitahuan dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).

Sedangkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Kasasi dan PK secara tepat waktu diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik pasal 34 ayat (7) "Pengadilan Pengaju harus mengirimkan salinan petikan dan/atau putusan kepada para pihak melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pengiriman salinan petikan dan/atau putusan:

Indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Sepanjang tahun 2025, tercatat penerimaan perkara banding, kasasi dan PK total 20 perkara, terdiri dari perkara banding (15 perkara), kasasi (5 perkara) dan PK (0 perkara). Sedangkan data penyelesaian perkara (putus) selama tahun 2025 total 15 perkara terdiri dari Banding (14 perkara), kasasi (1 perkara).

Keseluruhan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK telah dikirim/diberitahukan secara tepat waktu, Berikut perhitungan realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amat putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu:

$$\frac{15 \text{ Perkara}}{15 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

15 Perkara

Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 98%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah **102,04%**.

Capaian target ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Para pihak telah mendaftar akun e-court sejak perkara Banding dan Kasasi dan mendapatkan notifikasi WhatsApp dan email dari perkara didaftarkan hingga perkara BHT.
2. Adanya monitoring pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Banding, Kasasi dan PK

Pada tahun 2025, terdapat perubahan parameter indikator kinerja, periode 2020-2024 indikator kinerja diukur berdasarkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK. Sedangkan tahun 2025, indikator kinerja berfokus pada efektivitas pengiriman/pemberitahuan salinan putusan. Sehubungan hal tersebut, maka pada laporan ini tidak menyajikan data komparasi dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga data kinerja tahun 2025 akan dijadikan dasar untuk pengukuran kinerja pada periode mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran perbulan mulai Januari sampai dengan Desember atas sasaran, indikator, dan target pada revisi perjanjian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel.	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi	Januari	98,00%	100,00%	102,04%
		Februari	98,00%	100,00%	102,04%
		Maret	98,00%	100,00%	102,04%
		April	98,00%	100,00%	102,04%

responsive dan modern	dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Mei	98,00%	100,00%	102,04%
		Juni	98,00%	100,00%	102,04%
		Juli	98,00%	100,00%	102,04%
		Agustus	98,00%	100,00%	102,04%
		September	98,00%	100,00%	102,04%
		Oktober	98,00%	100,00%	102,04%
		November	98,00%	100,00%	102,04%
		Desember	98,00%	100,00%	102,04%

1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (5) bahwa putusan/penetapan yang diucapkan secara elektronik, secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan kedalam SIP dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.

Indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dihitung dengan membandingkan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi.

Perkara putus tahun 2025 sebanyak 824 perkara diupload tepat waktu sebanyak 824 perkara, sehingga realisasi indikator kinerja ini dihitung sebagai berikut:

$$\frac{824 \text{ Perkara}}{824 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100,00\%$$

824 Perkara

Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja adalah **100,00%**. Capaian target ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Monitoring harian terhadap pengunggahan putusan
2. Adanya aplikasi anonimisasi putusan memudahkan petugas dalam mengunggah salinan putusan ke direktori putusan dan fitur antrian Direktori putusan pada aplikasi SIPP.

Indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun ini tidak dapat dikomparasikan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga data kinerja tahun 2025 akan dijadikan dasar untuk pengukuran kinerja pada periode mendatang

Berikut disajikan capaian per bulan pada tahun 2025 atas dasar revisi perjanjian kinerja tahun 2025:

INDIKATOR	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Januari	100,00%	100,00%	100,00%
	Februari	100,00%	100,00%	100,00%
	Maret	100,00%	100,00%	100,00%
	April	100,00%	100,00%	100,00%
	Mei	100,00%	100,00%	100,00%
	Juni	100,00%	100,00%	100,00%
	Juli	100,00%	100,00%	100,00%
	Agustus	100,00%	100,00%	100,00%
	September	100,00%	100,00%	100,00%
	Oktober	100,00%	100,00%	100,00%
	November	100,00%	100,00%	100,00%
	Desember	100,00%	100,00%	100,00%

1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di Pengadilan Agama (PA) dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan termohon tidak melaksanakannya secara sukarela. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, sidang *aanmaning* (teguran), sita eksekusi, hingga eksekusi riil atau lelang, dengan pendekatan yang humanis terutama untuk perkara anak, guna memastikan kepastian hukum.

Indikator kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan merupakan perbandingan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi. Perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2025 sebanyak 1 perkara

yaitu perkara nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA. Yk pada tanggal 18 Juni 2025 dan dicabut pada tanggal 16 Juli 2025, sehingga realisasi penyelesaian perkara eksekusi sebesar 100%. Target indikator kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan ditetapkan sebesar 68%, sehingga capaian indikator kinerja adalah 147,06%.

Capaian target ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kepatuhan para pihak dalam menjalankan pelaksanaan isi putusan dalam tahap anmaning (teguran)
2. Sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi terkait mengenai sita eksekusi
3. Keberhasilan dalam penawaran penjualan lelang.

Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan oleh dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Putusan yang dimohonkan eksekusi	Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama u	2025	1	1	68,00%	100,00%	147,06%
	2024	98	97	98,00%	98,98%	101,00%
	2023	2	2	98,00%	100,00%	102,04%
	2022	885	872	98,00%	98,53%	100,54%
	2021	924	908	95,00%	98,27%	103,44%

Dilihat dari tabel diatas, terdapat perbedaan parameter pengukuran indikator kinerja, sebagai contoh parameter tahun 2022, 2023 menggunakan dasar pembandingnya adalah jumlah putusan yang dibandingkan dengan yang tidak mengajukan eksekusi, sedangkan tahun 2024 menggunakan parameter yang sama dengan tahun 2025 yaitu permohonan eksekusi yang diselesaikan dibandingkan dengan perkara eksekusi yang dimohonkan.

Berikut disajikan capaian per bulan pada tahun 2025 atas dasar revisi perjanjian kinerja tahun 2025:

INDIKATOR	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	Januari	68,00%	0	0
	Februari	68,00%	0	0
	Maret	68,00%	0	0
	April	68,00%	0	0
	Mei	68,00%	0	0
	Juni	68,00%	0	0
	Juli	68,00%	100,00%	147,05%
	Agustus	68,00%	0	0
	September	68,00%	0	0
	Oktober	68,00%	0	0
	November	68,00%	0	0
	Desember	68,00%	0	0

1.6. Persentase perkara yang menggunakan e-court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menerangkan bahwa pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku pada Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Sesuai dengan berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Badilag mengadaptasi dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, sehingga sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Badilag tersebut seluruh perkara persidangan di elektronik dilaksanakan secara elektronik dengan e-Court, yang kemudian Pengadilan Agama Yogyakarta mendukung kebijakan tersebut dengan mewajibkan seluruh perkara diselesaikan secara e-Court pada tahun 2025 mencapai 100% perkara secara e-court. Indikator

kinerja persentase perkara yang menggunakan e-court merupakan perbandingan jumlah perkara yang diajukan menggunakan e-court dibagi beban perkara.

Jumlah perkara yang diterima selama tahun 2025 sebanyak 840 perkara dan seluruhnya menggunakan e-court sehingga realisasi perkara e-court sebesar 100%. Target indikator ini ditetapkan sebesar 95%, maka capaian kinerja persentase perkara yang menggunakan e-court adalah **105,26%**

Capaian target ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Dasar hukum yang jelas dan sinergitas capaian kinerja dari kebijakan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama sehingga kebijakan internal Pengadilan Agama Yogyakarta mewajibkan perkara secara e-court sejak tahun 2025.
2. Sarana dan prasarana yang mendukung seperti jaringan dan alat pengolah data yang memadai pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan disediakan meja dan petugas khusus e-court
3. Sosialisasi masif kepada para pengguna layanan Pengadilan Agama Yogyakarta baik dilakukan secara langsung maupun melalui website/medsos.

Indikator kinerja persentase perkara yang menggunakan e-court pada tahun ini tidak dapat dikomparasikan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator kinerja persentase perkara yang menggunakan e-court, sehingga data kinerja tahun 2025 akan dijadikan dasar untuk pengukuran kinerja pada periode mendatang

Berdasarkan hasil pengukuran perbulan mulai Januari sampai dengan Desember atas sasaran, indikator, dan target pada revisi perjanjian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

INDIKATOR	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.6 Persentase perkara yang menggunakan e-court	Januari	95,00%	100,00%	105,26%
	Februari	95,00%	100,00%	105,26%
	Maret	95,00%	100,00%	105,26%
	April	95,00%	100,00%	105,26%
	Mei	95,00%	100,00%	105,26%
	Juni	95,00%	100,00%	105,26%
	Juli	95,00%	100,00%	105,26%
	Agustus	95,00%	100,00%	105,26%
	September	95,00%	100,00%	105,26%
	Oktober	95,00%	100,00%	105,26%
	November	95,00%	100,00%	105,26%
	Desember	95,00%	100,00%	105,26%

1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah.

Jumlah perkara Pengadilan Agama Yogyakarta yang berhasil dimediasi sebanyak 111 Perkara Dari total 145 Perkara yang dimediasi

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat total penerimaan perkara sebanyak **840 perkara**. Komposisi beban kerja tersebut didominasi oleh perkara kontentius/gugatan sebanyak **661 perkara**, sedangkan perkara voluntair/permohonan tercatat sebanyak **179 perkara**.

Dalam upaya mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur damai, terdapat **145 perkara** yang memenuhi kriteria untuk dilakukan mediasi. Dari jumlah tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta berhasil menunjukkan kinerja yang sangat impresif dengan tingkat keberhasilan mediasi mencapai **76,55% (111**

perkara). Adapun 32 perkara (22,07%) dinyatakan tidak berhasil, sementara 2 perkara sisanya (1,38%) masih dalam proses mediasi pada akhir tahun berjalan.

Indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi merupakan perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Target indikator ini ditetapkan sebesar 41% dan realisasi 76,55% sehingga capaian kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah **186,71%**.

Capaian target ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Meningkatkan kinerja mediator dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi mediasi dan dapat dijadikan bahan evaluasi mediator.
2. Memonitoring pelaksanaan mediator secara berkala
3. Memberikan penghargaan terhadap mediator non hakim yang berkinerja terbaik (keberhasilan mediasi paling banyak).

Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara diselesaikan melalui mediasi Tahun 2025	Jumlah Perkara yang dimediasi Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2025	111	145	41,00%	76,55%	186,71%
	2024	52	129	10,00%	40,31%	403,10%
	2023	55	162	7,00%	33,95%	485,01%
	2022	11	176	6,00%	6,25%	104,17%
	2021	9	149	10,00%	6,04%	60,40%

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan realisasi perkara berhasil di selesaikan mediasi dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan diawali tahun 2021 realisasi sebesar 6,04% sampai dengan tahun 2025 realisasi mencapai

76,55%, melihat perkembangan tersebut maka penetapan target pada tahun-tahun berikutnya dinaikkan menjadi 41% sehingga target yang ditetapkan menjadi relevan dan terukur sesuai kemampuan dan keberhasilan yang telah dicapai.

Tabel Rekapitulasi perkara yang dimediasi Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Perkara		
			Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
Januari	125	10	2	8	-
Februari	153	14	0	7	2
Maret	137	11	2	14	-
April	133	11	3	10	-
Mei	168	13	1	7	-
Juni	143	15	2	15	-
Juli	165	11	3	10	-
Agustus	157	9	4	3	-
September	167	14	1	12	-
Oktober	146	16	10	10	-
November	161	10	2	5	-
Desember	133	11	2	10	-
Jumlah	-	145	30	111	2

Berdasarkan hasil pengukuran perbulan mulai Januari sampai dengan Desember atas sasaran, indikator, dan target pada revisi perjanjian kinerja Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

INDIKATOR		BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Januari	41,00%	80,00%	195,12%
		Februari	41,00%	50,00%	121,95%
		Maret	41,00%	127,27%	310,41%
		April	41,00%	90,91%	221,73%
		Mei	41,00%	53,85%	131,34%
		Juni	41,00%	100,00%	243,90%
		Juli	41,00%	90,91%	221,73%
		Agustus	41,00%	33,33%	81,29%
		September	41,00%	85,71%	209,94%
		Oktober	41,00%	62,50%	152,43%
		November	41,00%	50,00%	121,95%
		Desember	41,00%	90,91%	221,73%

1.8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo/ pembebasan biaya perkara yang ditangani merupakan jumlah perkara masuk yang diajukan secara Pembebasan Biaya Perkara atau dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran berjalan. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 2025 sebesar 100% sesuai jumlah volume pada DIPA yaitu 30 perkara. Sedangkan realisasi pada tahun 2025 sejumlah 30 perkara dari target sebesar 30 perkara sehingga capaiannya di tahun 2025 sebesar 100%. Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara prodeo/pembebasan biaya perkara yaitu sebanyak 30 perkara dari 30 perkara prodeo yang masuk, sehingga capaian persentase penyelesaian perkara prodeo tepat waktu sebesar 100%.

Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Yogyakarta melakukan ketersediaan secara prodeo (Cuma-Cuma). Sosialisasi tersebut dilakukan dilakukan secara langsung melalui meja informasi maupun media sosial Pengadilan Agama Yogyakarta Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

$$\frac{\text{Jml perkara prodeo diselesaikan}}{\text{Jml Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{30 \text{ Perkara}}{30 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Target indikator persentase permohonan pembebasan biaya perkara sebesar 97% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 103,09%. Berikut disajikan progres perkembangan pembebasan biaya perkara selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel Perbandingan Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2025:

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Prodeo diselesaikan Tahun 2025	Jumlah Perkara Prodeo Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Prodeo yang ditangani	2025	30	30	97,00%	100,00%	103,09%
	2024	30	30	100,00%	100,00%	100,00%
	2023	30	30	100,00%	100,00%	100,00%
	2022	30	30	100,00%	100,00%	100,00%
	2021	26	30	100,00%	86,67%	86,67%

Pada tahun 2021 perkara prodeo yang diselesaikan hanya tercapai 26 dari target 30 perkara dikarenakan beberapa perkara menambah panjar biaya sehingga dana DIPA tidak mencukupi untuk memenuhi volume output/target output yang ditetapkan. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya tercapai 100% Keberhasilan target ini dikarenakan terus-menerus dilakukan sosialisasi pendaftaran perkara secara prodeo baik secara langsung melalui meja informasi maupun sosial media Pengadilan Agama Yogyakarta.

Tabel Daftar Perkara yang dilayani dari Pembebasan Biaya Perkara

NO	NO. PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PUTUS
1	12/Pdt.P/2025/PA.Yk	PERWALIAN	14-02-2025
2	14/Pdt.P/2025/PA. Yk	PERWALIAN	06-01-2025
3	21/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	30-01-2025
4	22/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	22-05-2025
5	23/Pdt.G/2025/PA. Yk	CT	24-01-2025
6	24/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	24-01-2025
7	25/Pdt.G/2025/PA. Yk	CT	30-01-2025
8	32/Pdt.G/2025/PA. Yk	CT	14-02-2025
9	40/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	04-02-2025
10	52/Pdt.G/2025/PA. Yk	ISTBAT NIKAH	25-02-2025
11	53/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	07-02-2025
12	54/Pdt.G/2025/PA. Yk	CT	10-02-2025
13	60/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	11-02-2025
14	61/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	18-03-2025
15	67/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	18-02-2025
16	69/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	25-02-2025
17	72/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	20-02-2025
18	73/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	18-02-2025
19	79/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	24-02-2025
20	80/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	06-03-2025
21	82/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	24-02-2025
22	89/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	21-02-2025

23	90/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	11-04-2025
24	91/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	24-02-2025
25	92/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	27-02-2025
26	97/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	28-02-2025
27	98/Pdt.G/2025/PA. Yk	CT	04-03-2025
28	103/Pdt.G/2025/PA. Yk	CT	08-05-2025
29	104/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	25-03-2025
30	105/Pdt.G/2025/PA. Yk	CG	11-03-2025

Berdasarkan hasil pengukuran perbulan mulai Januari sampai dengan Desember atas sasaran, indikator, dan target pada revisi perjanjian kinerja Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

INDIKATOR		BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.8	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	Januari	97,00%	100,00%	103,09%
		Februari	97,00%	100,00%	103,09%
		Maret	97,00%	100,00%	103,09%
		April	97,00%	100,00%	103,09%
		Mei	97,00%	100,00%	103,09%
		Juni	97,00%	0	
		Juli	97,00%	0	
		Agustus	97,00%	0	
		September	97,00%	0	
		Oktober	97,00%	0	
		November	97,00%	0	
		Desember	97,00%	0	

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	3,83	103,51
Persentase pengguna bantuan hukum	100,00%	117,72%	117,72%

2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta telah melakukan survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 tahun 2017, dengan melakukan survey sebanyak 4 kali yaitu periode Triwulan I-IV dengan jumlah total responden sebanyak 455 responden. Perhitungan dinilai dengan metode nilai rata-rata tertimbang atau konversi IKM dari Triwulan I-IV. Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2025 secara keseluruhan dari Triwulan I-IV mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu:

- 1) Triwulan I : 3,88 atau konversi sebesar **97%**
- 2) Triwulan II : 3,69 atau konversi sebesar **92,25%**
- 3) Triwulan III : 3,81 atau konversi sebesar **95,25%**
- 4) Triwulan IV : 3,93 atau konversi sebesar **98,25%**

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tertimbang SKM adalah 3,83 atau konversi IKM sebesar 103,51%. Nilai capaian ini diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,70%. Capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dapat dijelaskan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \text{Capaian} , \text{ sehingga } \frac{3,83}{3,70} \times 100 = 103,51$$

Tabel Perbandingan Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021 s.d 2025:

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Responden Survey	Jumlah Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	2025	518	516	3,70	3,83	103,51%
	2024	309	293	90%	94,81%	105,34%
	2023	285	276	88%	96,66%	109,84%
	2022	240	215	85%	89,46%	105,25%
	2021	354	312	84%	88,12%	104,90%

Dilihat perkembangan capaian indeks kepuasan pengguna layanan yang merupakan tolok ukur kualitas pelayanan Pengadilan Agama Yogyakarta selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Capaian kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2024 dan 2023 dikarenakan penetapan target 2025 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, 3,70 jika dikonversi ke persentase menjadi 92,50% tahun sebelumnya 90%. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Yogyakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai upaya dari peningkatan kompetensi petugas PTSP, pembagian jadwal petugas layanan pada jam istirahat, pendampingan pendaftaran secara e-court, penyediaan jasa pos bantuan hukum serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

2.2 Persentase Pengguna Bantuan Hukum

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin/masyarakat tidak mampu secara finansial) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) merupakan banyaknya

masyarakat yang dilayani selama jam layanan Pos Layanan Hukum sesuai dengan kontrak.

Rumusan indikator ini dengan menghitung jumlah pengguna layanan Posbakum yang dilayani dibagi dengan jumlah permohonan layanan Posbakum dikalikan 100%. Indikator ini mengukur sejauh mana Pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan, khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan.

Pada tahun 2025, kontrak yang disepakati antara Pengadilan Agama Yogyakarta dan penyedia jasa layanan hukum untuk melayani 914 Orang, sedangkan pengguna yang dilayani 1076 orang, sehingga realisasi tercapai sebesar 117,72%, Target indikator ini ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja persentase pengguna layanan Posbakum adalah **117,72%**.

Capaian target ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban administrasi kepada masyarakat kurang mampu ketika berperkara di pengadilan baik secara langsung oleh petugas maupun melalui media sosial
2. Meningkatkan kinerja rekanan jasa Posbakum melalui evaluasi dan monitoring secara berkala.

Tabel Perbandingan pengguna layanan Posbakum tahun 2021 s.d 2025:

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah pengguna layanan Posbakum	Jumlah pengguna layanan Posbakum yang dilayani	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengguna bantuan hukum	2025	914	1076	100,00%	117,72%	117,72%
	2024	914	1004	100,00%	109,85%	109,85%
	2023	900	902	100,00%	100,22%	100,22%
	2022	900	955	100,00%	106,11%	106,11%
	2021	624	704	100,00%	112,82%	112,82%

Dilihat perkembangan capaian pengguna layanan Posbakum selama kurun waktu 5 tahun tercapai melebihi 100% dan peningkatan yang signifikan.

Berikut dapat disajikan tabel layanan posbakum setiap bulan selama tahun 2025

	Jumlah pengguna yang dilayani	Target layanan Posbakum	%
Januari	133	110	120.91%
Februari	95	100	95.00%
Maret	68	55	123.64%
April	82	85	96.47%
Mei	102	110	92.73%
Juni	89	60	148.33%
Juli	100	90	111.11%
Agustus	93	100	93.00%
September	83	74	112.16%
Oktober	87	80	108.75%
November	76	50	152.00%
Desember	68		-
Jumlah	1076	914	117,72%

3. Sasaran Strategis : Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71,00%	83,40%	117,46%
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,00%	96,36%	103,61%

	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75%	80,10%	106,80%
	3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00	3,675	122,50%

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional merupakan sasaran strategis baru yang diimplementasikan mulai tahun 2025. Mengingat sasaran dan indikator ini baru ditetapkan pada periode berjalan, maka data capaian tahun ini tidak dapat diperbandingkan (*not comparable*) dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian indikator pada tahun 2025 akan ditetapkan sebagai Nilai Dasar (Baseline) yang menjadi acuan pembandingan dan target pengembangan untuk periode tahun-tahun berikutnya.

3. 1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (ASN)

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71,00%	83,40%	117,46%

Indikator ini menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan, target yang ditentukan dari Badan Peradilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama 71% dan realisasi tercapai 83,40%,

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	401199 - Pengadilan Agama Yogyakarta	54	30	83,40	tinggi	22,83	30,67	25,00	4,90	-	-	-

sehingga capaian indikator kinerja IP ASN sebesar **117,46%**. Adapun nilai per komponennya antara lain kualifikasi 22,83%, kompetensi 30,67% dan kinerja



25,00% serta disiplin 4,90%. Komponen terendah adalah kompetensi dengan nilai 30,67% dari bobot 40%.

Kompetensi merupakan pengembangan ASN melalui diklat, seminar, magang atau pelatihan jarak jauh. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 bahwa setiap ASN wajib memenuhi minimal 20 jam pelajaran (JPL) dalam setahun, sebanyak 27 orang (dari jumlah ASN 54 orang atau 50% yang belum memenuhi kewajiban diklat minimal 20 jam pelajaran. Upaya untuk meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 antara lain:

1. Mendata kebutuhan diklat untuk masing-masing jabatan
2. Mengikutsertakan ASN untuk diklat yang disediakan oleh internal Mahkamah Agung dan oleh instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, LKPP dan lain-lain.

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,00%	96,36%	103,61%

Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran melalui perbandingan antara capaian output dan outcome terhadap alokasi pagu yang tersedia. Berdasarkan target IKPA sebesar 93%, berikut adalah realisasi pada masing-masing DIPA:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi), diperoleh IKPA sebesar 99,87%, sehingga capaian kinerja IKPA sebesar **107,39%** dengan rincian per komponen penilaian sebagai berikut

Komponen penilaian	Sub komponen	Bobot	Nilai
Kualitas perencanaan anggaran	Revisi DIPA	10%	10,00%
	Deviasi halaman 3 DIPA	15%	15,00%
Kualitas perencanaan anggaran	Penyerapan anggaran	20%	20,00%
	Belanja kontraktual	10%	10,00%
	Penyelesaian tagihan	10%	10,00%

	Pengelolaan UP dan TUP	10%	9,87%
Kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Capaian Output	25%	25,00%
TOTAL		100%	99,87%

2. DIPA 04 (Badan Peradilan Agama), diperoleh IKPA sebesar 92,85%, sehingga capaian kinerja IKPA sebesar **99,84%** dengan rincian per komponen penilaian sebagai berikut:

Komponen penilaian	Sub komponen	Bobot	Nilai
Kualitas perencanaan anggaran	Revisi DIPA	10%	10,00%
	Deviasi halaman 3 DIPA	15%	15,00%
Kualitas perencanaan anggaran	Penyerapan anggaran	20%	18,64%
	Belanja kontraktual	10%	10,00%
	Penyelesaian tagihan	10%	10,00%
	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10,00%
Kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Capaian Output	25%	19,21%
TOTAL		100%	92,85%

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Meskipun secara total melampaui target, terdapat komponen Pengelolaan UP dan TUP yang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh:

- Rendahnya persentase pengembalian GU Nihil (89,10%)
- Kondisi tersebut berdampak pada tidak maksimalnya bobot nilai pengelolaan UP/TUP (tercapai 9,87% dari 10%).

Komponen lainnya seperti Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, Deviasi Hal. III DIPA, Belanja Kontraktual, dan Capaian Output telah memberikan kontribusi nilai yang optimal sesuai bobot masing-masing.

DIPA 04 (Badan Peradilan Agama)

Pada DIPA 04, terdapat dua komponen utama yang belum mencapai nilai maksimal, antara lain:

- Penyerapan Anggaran (18,64% dari bobot 20%)
- Capaian Output (19,21% dari bobot 25%)

Rendahnya penyerapan pada belanja Jasa Mediator Eksternal disebabkan alokasi biaya ini diperuntukkan bagi mediasi perkara prodeo, namun dalam pelaksanaannya mayoritas perkara tersebut tidak melalui proses mediasi, sehingga anggaran tidak dapat terserap secara optimal.

Berdasarkan pelaksanaan anggaran 2025 menjadi pembelajaran pengelolaan anggaran tahun 2026, upaya untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

- Rencana pencairan dana harian dan bulanan lebih matang melalui berkoordinasi dengan tiap-tiap bagian yang dikoordinir oleh Kasubbag Umum dan Keuangan
- Penyesuaian rencana halaman 3 DIPA dan jika memungkinkan dilakukan revisi capaian output atas dasar pertimbangan kemungkinan besar tidak dapat tercapainya target sampai dengan akhir tahun.

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75,00%	80,10%	106,80%

Indikator ini untuk menilai kualitas perencanaan berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Berdasarkan target yang ditetapkan (75%), berikut adalah realisasi pada masing-masing DIPA:

- DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi), mencapai 100,00%, sehingga capaian kinerja NKPA sebesar **133,33%**

- DIPA 04 (Badan Peradilan Agama), mencapai 60,19%, sehingga capaian kinerja NKPA sebesar **80,25%**.

NKPA DIPA 01 dan DIPA 04 digabungkan menjadi **80,10%**, jika dibandingkan dengan target kinerja NKPA 75% maka capaian kinerja sebesar **106,80%**. Berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian triwulan 3 tahun 2025 terdapat output mediasi eksternal yang tidak dapat dicapai karena peruntukan bagi mediasi perkara prodeo, sementara perkara prodeo setahun hanya 30 perkara dan output untuk mediasi eksternal sebanyak 131 perkara sehingga yang terealisasi hanya 1 perkara dengan biaya sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Seperti halnya dibahas pada upaya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2026, terdapat peran perencanaan dengan melakukan revisi halaman III DIPA dan revisi detail per akun.

3.4. Indeks Pengelolaan Aset

Indikator kinerja ini untuk mengukur kualitas tata Kelola Barang Milik Negara (BMN). Nilai Indeks Pengelolaan aset tahun 2025 mencapai 3,675 dari nilai maksimal 4,00. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 3 sehingga capaian kinerja indeks pengelolaan aset sebesar **122,50%**. Komponen nilai yang belum maksimal terdapat pada kriteria kepatuhan pengelola BMN terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), laporan dikirimkan tepat waktu sesuai timeline sehingga bobot nilai 3 dari 4. Jika dilaporkan lebih cepat 5 hari maka akan mendapatkan skor maksimal (4).
- b. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL, penyampaian laporan disampaikan sesuai batas waktu penyampaian sehingga bobot nilai 3 dari 4.
- c. Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN

Upaya peningkatan kinerja pengelolaan aset tahun 2026, antara lain agar penyampaian dokumen LBKP dan WASDAL dapat dilaporkan 1-3 hari.

➤ **Perbandingan capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Target Kinerja Mahkamah Agung**

Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan target kinerja mengacu pada target kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga Pusat dari badan peradilan. Sebagai pengadilan tingkat pertama, melakukan perbandingan antara kinerja satuan kerja dengan target yang ditetapkan oleh pusat merupakan bagian penting manajemen kinerja. Berikut beberapa tujuan perbandingan ini adalah:

1. Menyelaraskan rencana strategi, benchmark ini memastikan bahwa setiap badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung tidak berjalan sendiri-sendiri, tetap berada pada visi yang sama “mewujudkan badan peradilan yang agung”
2. Mengidentifikasi kesenjangan, membandingkan kondisi kenyataan di lapangan yang dialami oleh masing-masing pengadilan sehingga diketahui kelemahan dan kekuatan untuk digali potensi kinerjanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 pada matrik kinerja dan pendanaan, berikut disajikan perbandingan capaian kinerja antara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan target Mahkamah Agung:

Tabel Perbandingan Target kinerja Mahkamah Agung dengan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PA Yogyakarta		MA RI
			Target	Realisasi	Target
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	99,15%	97,00%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100,00%	100,00%	100,00%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju' kepada para pihak	98,00%	100,00%	98,00%
	1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100,00%	100,00%	100,00%
	1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68,00%	100,00%	68,00%
	1.6	Persentase perkara yang menggunakan e-court	95,00%	100,00%	95,00%
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41,00%	76,55%	41,00%
	1.8	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97,00%	100,00%	97% (IKL)
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	3,83 (95,75%)	3,70 (92,50%)
	2.2	Persentase pengguna bantuan hukum	100,00%	117,72%	100% (IKL)
Terwujud manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71,00%	83,40%	71%
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,00%	96,36%	93,00%
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75,00%	80,10%	75,00%
	3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00	3,675 (91,88%)	3,00 (75%)
		RATA-RATA		94,84%	85,66%

IKL = Indikator Kinerja Lainnya, penetapan target ditentukan oleh Badan Peradilan Agama

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta melebihi target kinerja yang ditetapkan Mahkamah Agung yaitu sebesar 94,84% dari 85,66% artinya capaian target sebesar 110,70%. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian realisasi yang belum memenuhi target Mahkamah Agung, yaitu:

1. Indikator Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian triwulan III tahun 2025, terdapat gap yang besar pada salah satu unsur IKPA yaitu capaian output dengan nilai 19,21% dari bobot 25%. Hal ini disebabkan terdapat ketimpangan data antara target output mediasi eksternal yang diperuntukan untuk perkara prodeo sebanyak 131 perkara, sementara total perkara prodeo setahun hanya 30 perkara. Oleh karena kriteria penilaian capaian output menjadi salah satu unsur penilaian kinerja perencanaan anggaran, maka pada indikator NKPA juga dilakukan penyesuaian target.

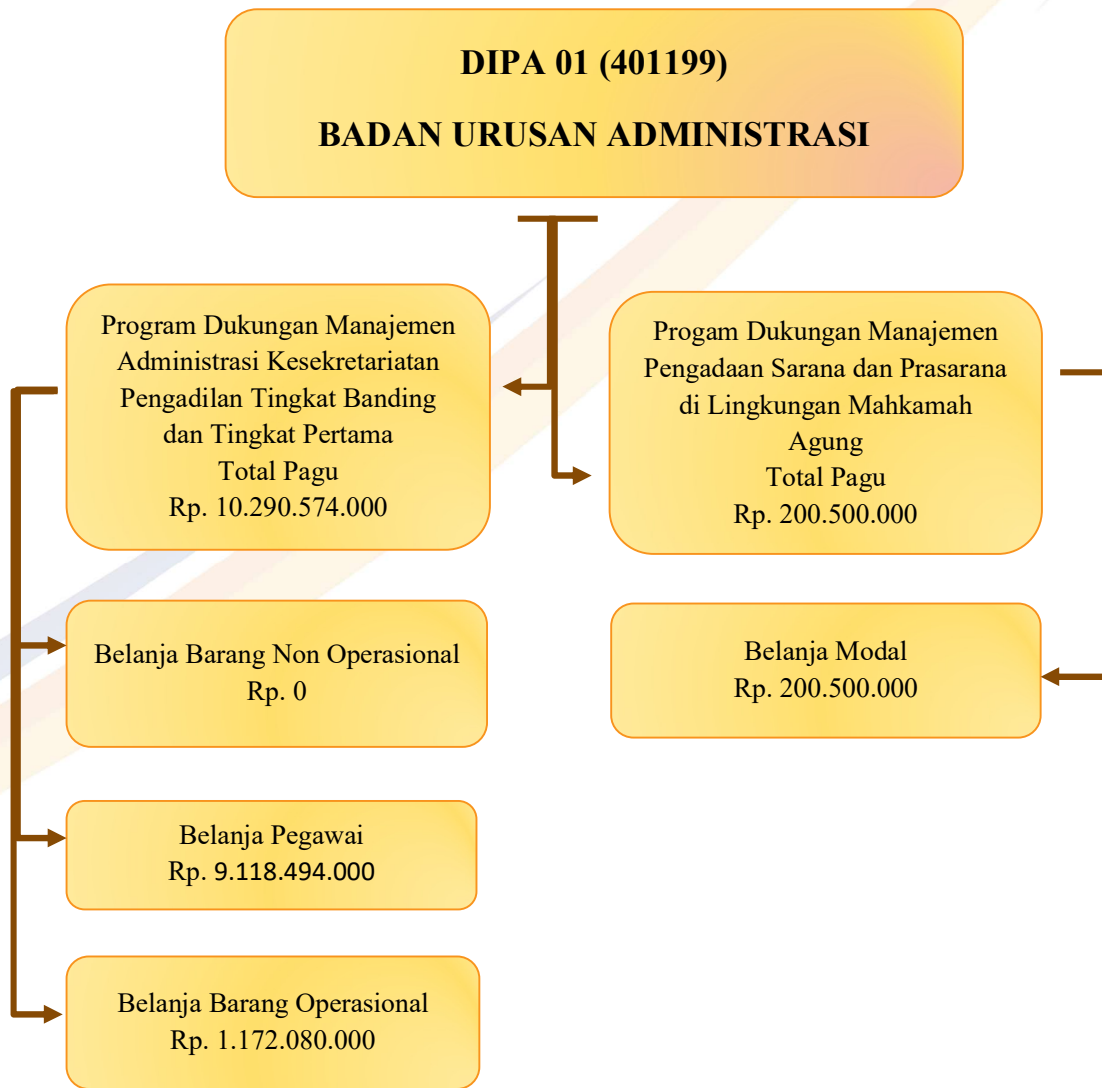
2. Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian triwulan III Tahun 2025, deviasi ini disebabkan oleh target output mediasi eksternal yang tidak proporsional dengan jumlah perkara. Beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2025:

- a. Anggaran tersebut diperuntukan bagi mediasi perkara prodeo, namun terdapat ketimpangan data antara target output 131 perkara, sementara total perkara prodeo setahun hanya 30 perkara. Data realisasi anggaran per 31 Desember 2025 realisasi anggaran mediasi eksternal, sedangkan perkara prodeo yang dimediasi hanya 1 (satu) perkara dengan serapan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada bulan Februari 2025 termasuk anggaran DIPA 04 yang mengalami efisiensi, sehingga anggaran tidak dapat digunakan untuk kegiatan mediasi perkara prodeo dan anggaran tersebut ditarik oleh Badan Peradilan Agama

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA Tahun 2025 di Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama MARI) yang dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan program peningkatan manajemen peradilan agama yang terdiri dari percepatan penyelesaian perkara, biaya prodeo, dan pos bantuan hukum, sebagai berikut:



1. Belanja Pegawai

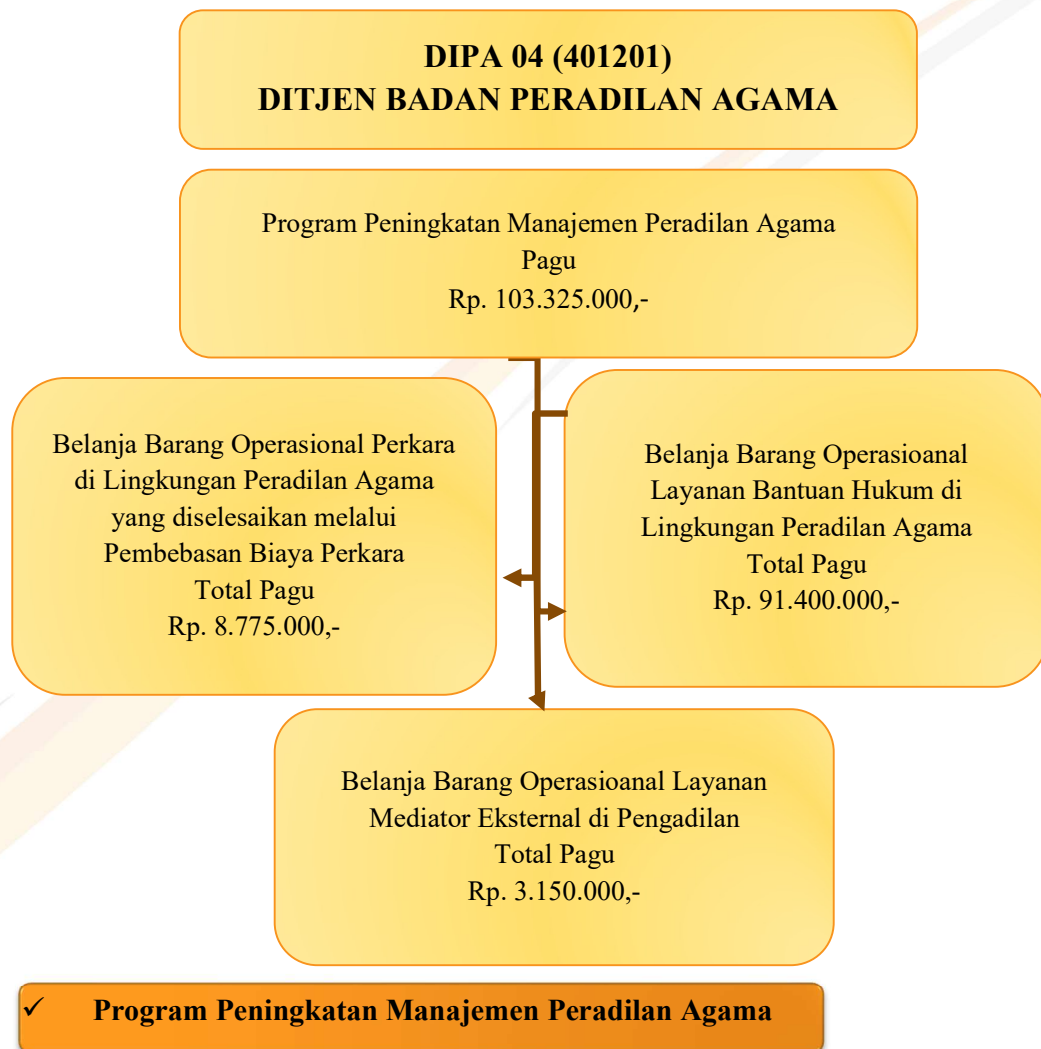
Anggaran belanja pegawai tahun 2025 berjumlah Rp9.118.494.000,- (Sembilan miliar seratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu), Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp9.007.701.382,- (Sembilan milyar tujuh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan presentase sebesar 98,78 %.

2. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

Anggaran Belanja Barang Operasional tahun 2025 di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp 1.172.080.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), realisasi pelaksanaan anggaran belanja barang terhitung sampai dengan bulan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp1.171.927.086,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) dengan persentase sebesar 99,99 %.

3. Belanja Modal

Anggaran belanja modal tahun 2025 di Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah sebesar Rp200.500.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), Adapun realisasi pelaksanaan anggaran Belanja Modal terhitung sampai dengan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp200.488.540,- (dua ratus juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan persentase sebesar 99,99%.



✓ **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan anggaran program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp103.325.000,- (seratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari Anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp91.400.000,-, mediator eksternal di Pengadilan sebesar Rp3.150.000,- dan pembebasan biaya perkara sebesar Rp8.775.000,-.

Adapun realisasi anggaran pos bantuan hukum adalah sejumlah Rp91.400.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan persentase 100%. Pembebasan biaya perkara dengan realisasi sebesar Rp3.990.000,- (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) persentase 45,47%, sisa Rp4.785.000,-

merupakan biaya pemanggilan tidak terealisasi karena perkara diterima tahun 2025 merupakan perkara e-court sehingga pemanggilan secara tercatat melalui pos. realisasi mediator eksternal sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari anggaran Rp3.150.000,- disebabkan petunjuk teknis penggunaan mediator eksternal diperuntukan perkara prodeo.

Realisasi Anggaran Belanja (401199) Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran 01 Tahun 2025

No.	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	
1	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan				
1	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.0000	700.000	100	0
TOTAL		700.000	700.000	100	
2	Gaji dan Tunjangan				
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.112.929.000	3.111.929.700	99,97	999.300
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.000	39.641	88,09	5.359
3	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	216.071.000	216.068.520	100,00	2.480
4	Belanja Tunj. Anak PNS	55.097.000	54.435.828	98,80	661.172
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	35.000.000	33.840.000	96,69	1.160.000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	153.710.000	152.689.000	99,69	481.000
7	Belanja Tunj. Pph PNS	22.158.000	21.261.640	95,95	896.360
8	Belanja Tunj. Beras PNS	132.223.000	132.021.660	99,85	201.340
9	Belanja Uang Makan PNS	441.904.000	416.115.000	94,16	25.789.000
10	Belanja Tunj. Umum PNS	40.650.000	40.190.000	98,87	460.000
11	Belanja Tunj. Pph. Pjb Negara	777.832.000	736.027.309	94,63	41.804.691
12	Belanja Tunj. Penghasilan Pjb Negara	3.954.300.000	3.920.700.000	99,15	33.600.000
13	Belanja Gaji Pokok PPPK	115.000.000	114.302.000	99,39	698.000
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.000	2.276	15,17	12.274
15	Belanja Tunj. Suami/istri PPPK	10.000.000	9.144.160	91,44	855.840
16	Belanja Tunj. Anak PPPK	3.000.000	2.743.248	91,44	256.752
17	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	500.000	0	0,00	500.000
18	Belanja Tunj. Beras PPPK	9.000.000	8.690.400	96,56	309.600
19	Belanja Uang Makan PPPK	31.600.000	30.201.000	95,57	1.399.000
20	Belanja Tunj. Umum PPPK	8.000.000	7.300.000	91,25	700.000
TOTAL		9.118.494.000	9.007.701.382	98,78	110.792.618

No.	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
A	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran				
1	Belanja Keperluan Perkantoran	294.407.000	294.379.415	99,99	27.585
2	Belanja Barang Persediaan barang konsumsi	29.946.000	29.946.000	100,00	0
B	Langganan Daya dan Jasa				
3	Belanja keperluan Perkantoran	192.015.000	192.000.000	99,99	15.000
4	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42.000	41.500	98,81	500
5	Belanja Langganan Telepon	1.188.000	1.187.236	99,94	764
C	Pemeliharaan Kantor				
6	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235.578.000	235.548.310	99,99	29.690
7	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.184.000	5.183.000	99,98	1.000
D	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166.829.000	166.782.545	99,97	46.455
E	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Satker				
9	Belanja Keperluan Perkantoran	36.028.000	36.028.000	100,00	0
10	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59.820.000	59.820.000	100,00	0
F	Belanja Sewa				
11	Belanja Sewa	19.000	0	0	19.000
G	Rapat Koordinasi				
12	Belanja Perjalanan dinas biasa	200.000	200.000	100,00	0
H	Konsultasi Ke Tingkat Pusat				
13	Belanja Perjalanan dinas biasa	3.632.000	3.631.080	99,97	920
I	Konsultasi ke Tingkat Banding				
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.012.000	2.000.000	99,40	12.000
J	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc				
15	Belanja Sewa Rumah Dinas.	144.180.000	144.180.000	100,00	0
K	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi				
16	Belanja Bahan	300.000	300.000	100,00	0
TOTAL					
4	Belanja Modal				
1	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.000.000	137.988.540	99,99	11.460
2	Pembangunan/renovasi Gedung dan bangunan	62.500.000	62.500.000	100,00	0
TOTAL		200.500.000	200.488.540	99,99	11.460

Persentase Pelaksanaan Anggaran DIPA 005.01 = 98,95%

Sedangkan realisasi anggaran belanja (401201) sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran 04 Tahun 2025

No.	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	
Percepatan Penyelesaian Perkara					
1	Jasa Mediator Eksternal	3.150.000	150.000	4,76	3.000.000
2	Pos Bantuan Hukum	91.400.000	91.400.000	100,00	0
3	Pembebasan Biaya Perkara	8.775.000	3.990.000	45,47	4.785.000
TOTAL		103.325.000	95.540.000	92,47	7.785.000

Persentase Pelaksanaan Anggaran DIPA 005.04 = 92,47%

C. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024

1. Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP 2024

Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 270/KPTA.W12-A/OT1.6/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang hasil evaluasi dan tindaklanjut penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, Pengadilan Agama Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 80.20% dengan kategori A (Sangat Baik) nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi terhadap penggabungan 5 komponen manajemen Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah dievaluasi sebagai berikut:

Tabel Nilai Akhir Evaluasi Tahun 2023 dan 2024

Komponen	Bobot Nilai (%)	Nilai Hasil Evaluasi (%)	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	24,00	26,70
b. Pengukuran Kinerja	30	24,00	22,20
c. Pelaporan Kinerja	15	12,00	10,05
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	21,25
e. Pencapaian Kinerja	-	-	-
Total	100	80,00	80,20

Adapun uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan kriteria sebanyak 36 yaitu dokumen perencanaan strategis (13 kriteria), Perencanaan Kinerja Tahunan (12 kriteria) dan dokumen Penetapan Kinerja (11 kriteria). Capaian pemenuhan indikator Perencanaan Kinerja

Pengaduan Agama Yogyakarta tahun 2024 memperoleh nilai evaluasi 26,70% dari bobot 30%, yang terdiri atas evaluasi :

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dan telah terdapat pohon kinerja namun belum menggambarkan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi (*top manager*) ke level unit/pegawai paling rendah (pegawai/pelaksana).
- 2) Dalam menyusun dokumen IKU tidak memperhatikan sasaran strategis yang terdapat dalam dokumen Renstra.

b. Evaluasi atas pengukuran Kinerja

Evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 19 indikator Capaian pemenuhan indikator Pengukuran Kinerja Pengaduan Agama Yogyakarta tahun 2024 memperoleh nilai evaluasi 22.20% dari bobot 30%, yang terdiri atas capaian, yaitu : Pemenuhan Pengukuran (2 kriteria), Kualitas Pengukuran (12 kriteria) dan Implementasi Pengukuran (5 kriteria), yang terdiri atas evaluasi:

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan karena belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun dalam monitoring evaluasi capaian kinerja belum dilakukan validitas oleh pejabat yang berwenang sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 19 indikator Capaian pemenuhan indikator Pengukuran Kinerja Pengaduan Agama Yogyakarta tahun 2024 memperoleh nilai evaluasi 10,05% dari bobot 15%, yang terdiri atas capaian, yaitu : Pemenuhan Pengukuran (2 kriteria), Kualitas

Pengukuran (12 kriteria) dan Implementasi Pengukuran (5 kriteria), yang terdiri dari evaluasi

- 1) Dokumen laporan kinerja telah direviu namun belum sesuai dengan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja SK SEKMA Nomor 878 Tahun 2022
 - 2) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/MA RI (*Benchmark* kinerja).
 - 3) Dokumen laporan kinerja telah diformalkan namun matrik kinerja dan pendanaan belum sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis.
- d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal
- Evaluasi atas Evaluasi Internal Pengaduan Agama Yogyakarta tahun 2024 memperoleh nilai evaluasi 21.25% dari bobot 25%, yang terdiri atas evaluasi:
- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Adapun rekomendasi atas evaluasi diatas sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja
 - 1) Agar dibuat pohon kinerja yang menggambarkan adanya penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi (*top manager*) ke level unit/pegawai paling rendah (pegawai/pelaksana)
 - 2) Agar dalam menyusun dokumen IKU memperhatikan tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen renstra, sehingga dalam dokumen LKjIP terdeskripsikan dengan baik.
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar dalam pembuatan pengukuran kinerja dan dilengkapi dengan jadwal monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi

- 2) Agar dalam membuat dokumen monev lebih teliti lagi terkait validitas dari pejabat yang berwenang seperti tanda tangan
- c. Pelaporan Kinerja
 - 1) Agar dalam pembuatan dokumen reuiu laporan kinerja memperhatikan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja SK SEKMA Nomor 878 Tahun 2022
 - 2) Agar dokumen laporan kinerja dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/MA-RI (*Benchmark* kinerja)
 - 3) Agar dokumen laporan kinerja yang telah diformalkan menyesuaikan matrik kinerja dan pendanaan dengan tujuan dan sasaran strategis
- d. Akuntabilitas Kinerja Internal
 - 1) Agar dibuat monev secara periodik dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

2. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP 2024

- a. Perencanaan kinerja
 - 1) Pohon kinerja telah dibuat dan disesuaikan dengan rencana strategis dan IKU 2025-2029 sebagaimana terdapat pada Bab II Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - 2) Dokumen IKU telah disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen Renstra sebagaimana terlampir dalam Dokumen IKU 2025.
- b. Pengukuran kinerja
 - 1) SOP pengukuran kinerja telah dibuat dan dilengkapi jadwal monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
 - 2) Dokumen monev telah dilengkapi dengan validitas tandatangan pejabat yang berwenang sebagaimana terlampir dalam laporan LKjIP 2025
- c. Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen reviu laporan kinerja 2025 telah disusun berpedoman pada SK SEKMA Nomor 878 tahun 2022, sebagaimana terdapat pada halaman awal laporan LKjIP 2025.
 - 2) Dokumen laporan kinerja dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dan pendanaan dengan level nasional/MA RI. Untuk perbandingan dengan Mahkamah Agung dilakukan terhadap target nasional yang ditetapkan Mahkamah Agung pada lampiran Rencana Strategis 2025-2029
 - 3) Dokumen laporan kinerja yang telah diformalkan menyesuaikan antara matrik kinerja dan pendanaan dengan tujuan dan sasaran strategis. Untuk matrik kinerja dan pendanaan 2025 sudah disesuaikan dengan sasaran strategis 2025-2029.
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja intenal
- 1) Monitoring dan evaluasi secara periodik dilakukan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui komdanas untuk periode Januari-September 2025 dengan IKU lama (2020-2024) dan periode Januari-Desember 2025 dengan IKU baru (2025-2029) melalui aplikasi Batara.

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2025

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

- melebihi target bulanan
- sesuai target bulanan
- di bawah target bulanan
- capaian nol
- tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2025

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1.	PA Yogyakarta DI Yogyakarta	113,78%	112,61%	119,25%	112,34%	105,29%	108,77%	111,91%	103,51%	109,46%

Referensi indikator

Laporan Bulanan

Show 10 entries

Excel

Satker	Capaian (%)												Rata2 Capaian (%)	Tahun	Aksi
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
Pengadilan Agama Yogyakarta	107.47	96.57	104.94	101.48	93.89	101.66	117.88	93.81	92.12	93.9	98.97	103.04	100.52	2025	Detail



BAB IV

PENUTUP



KESIMPULAN

REKOMENDASI



KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta mengalami perubahan penyajian disebabkan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bulan November 2025. Adapun kesimpulan dari laporan kinerja ini sebagai berikut:

1. Pelaporan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 menggunakan 2 (dua) acuan yang bersifat transisional. Untuk capaian kinerja Triwulan I s.d. Triwulan III, pengukuran masih didasarkan pada (IKU) Renstra 2020-2024. Selanjutnya, menindaklanjuti pemberlakuan kebijakan baru, maka pada Triwulan I s.d. Triwulan IV dilakukan penyesuaian melalui Penetapan Kinerja 2025 (Revisi) yang mengacu pada target dan indikator dalam Renstra 2025-2029
2. Berikut adalah poin-poin perbedaan mendasar antara IKU 2020-2024 dengan IKU 2025-2029 (Revisi)

Keterangan	IKU 2020-2024 (IKU lama)	IKU 2025-2029 (IKU Baru)
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 5. Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 3. Terwujud manajemen peradilan yang transparan dan profesional
IKU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 9 (sembilan) IKU dan 2 (dua) IKL (ditetapkan oleh PA Yogyakarta) 2. Layanan posbakum dan prodeo dijadikan IKU 3. Indikator Kinerja bidang Sekretariat merupakan IKL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 12 (dua belas) IKU dan 2 IKL (ditetapkan Badilag) 2. Layanan posbakum dan prodeo dijadikan IKL 3. Indikator bidang sekretariat menjadi IKU (4 IKU) 4. IKU perkara yang tidak mengajukan upaya banding dan kasasi dihapuskan, diganti pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh

	<p>pengadilan pengaju kepada para pihak (1.3)</p> <p>5. Adanya IKU persentase pengunggahan putusan ke direktori putusan (1.4)</p> <p>6. Adanya IKU persentase perkara menggunakan e-court (1.6)</p> <p>7. Adanya IKU IP ASN, IKPA, NKPA dan IPA</p>
--	---

3. Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 114,30%. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja dinyatakan “ Berhasil” karena memperoleh capaian kinerja diatas 100%, yaitu capaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern sebesar 118,30%, Sastra 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik sebesar 101,76%, Sastra 3: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional sebesar 122,59%.
4. Berdasarkan analisa perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dengan target nasional Mahkamah Agung RI. Meskipun terdapat 2 (dua) target yang ditetapkan dibawah target nasional, namun secara umum rata-rata realisasi kinerja mencapai 94,84% dari rata-rata target nasional yang ditetapkan sebesar 85,66%, artinya capaian kinerja rata-rata Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penetapan target nasional adalah 110,72%.
5. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.10.380.117.008,- (Sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan rupiah) atau 98,95%, dan anggaran dari DIPA (04) Badan Peradilan Agama sebesar Rp95.540.000 (Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau 92,47%.

REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan beberapa target kinerja ditetapkan dibawah target nasional agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan
2. Penguatan tata Kelola anggaran dengan meningkatkan koordinasi bagian perencanaan, pelaksanaan dan bagian kepaniteraan terkait pelaksanaan anggaran DIPA 04
3. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan Hakim dan Pegawai dalam diklat dan bimtek yang diselenggarakan dari internal Mahkamah Agung maupun instansi terkait
4. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

DAFTAR LAMPIRAN

LKjIP TAHUN 2025

1. SK Tim Penyusun LKjIP 2025
2. Tabel Capaian Kinerja 2020-2024
3. Tabel Monitoring dan Evaluasi IKU lama Triwulan I – III Tahun 2025
4. Tabel Monitoring dan Evaluasi IKU 2025 Triwulan I – IV Tahun 2025
5. Pernyataan Telah Reviu Atas Laporan Kinerja
6. Reviu Sheet Perjanjian Kinerja Tahun 2025
7. SOP Pengukuran Kinerja
8. Dokumen Notulasi penyusunan LKjIP dan Reviu LKjIP
9. Eviden screenshot (tangkapan layar) IKPA dan NKPA
10. Kertas Kerja Indeks Pengelolaan Aset
11. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 per 31 Desember 2025



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 53/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 2730/KPA/SK.KP3.4.6/XI/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Kedua : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keempat : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2026

KETUA



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 53/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.	Penanggungjawab
2.	Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.	Ketua
3.	Taslim, S.H.	Sekretaris
4.	Drs. Abdul Adhim AT	Koordinator Validasi Data
5.	Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.	Tim Pereviu Laporan Kinerja
6.	Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.	Tim Pereviu Laporan Kinerja
7.	Endang Winarni, S.H., M.H.	Anggota
8.	Dra. Hj. Lilik Mahsun, S.H., M.H.	Anggota
9.	Dra. Mardhiyah Nur	Anggota
10.	Nur Asiyah, S.E., M.M.	Anggota
11.	Verawati Widjaya, S.H., M.H.	Anggota
12.	Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.	Anggota
13.	Nurjanna Wasahua, S.Kom., M.H.	Anggota
14.	Megananda Hersayekti Cecriana, S.H.	Anggota
15.	Sinduka Bayu Pamungkas, A.Md. Pas.	Anggota

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA

KHOIRIYAH ROIHAN



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 53/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
2.	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
3.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
4.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
5.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
6.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit kerja.

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA



KHOIRIYAH ROIHAN



Lampiran 2: Tabel Capaian Kinerja 2020-2024

1. Indikator : Penyelesaian perkara tepat waktu

TAHUN	DITERIMA	SISA TYL	Total	PUTUS	<5 bin	Realisasi	Target	Capaian
2020	827	151	978	916	849	92,69%	90.00%	102.98%
2021	890	62	952	924	908	98,27%	92.69%	106.02%
2022	888	28	916	885	880	99,44%	99.00%	100.44%
2023	853	31	884	842	830	98,57%	98.00%	100.59%
2024	814	42	856	812	807	99,38%	98.00%	101.41%

Sumber LIPA 20 dan LKjIP 2020-2024

2. Indikator: Perkara yang tidak mengajukan banding

Tahun	Putus	tidak banding	Realisasi	Target	Capaian
2020	916	901	98.36%	98.00%	100.37%
2021	924	913	98.81%	98.36%	100.46%
2022	885	872	98.53%	98.50%	100.03%
2023	842	832	98.81%	98.50%	100.32%
2024	812	799	98.40%	98.35%	100.05%

Sumber: LIPA 2 dan LKjIP 2020-2024

3. Indikator: Perkara yang tidak mengajukan kasasi

Tahun	Putus	tidak kasasi	Realisasi	Target	Capaian
2020	916	901	98.36%	98.00%	100.37%
2021	924	916	99.13%	99.13%	100.00%
2022	885	879	99.32%	99.13%	100.19%
2023	842	836	99.29%	99.13%	100.16%
2024	812	807	99.38%	99.13%	100.26%

Sumber: LIPA 3 dan LKjIP 2020-2024

4. Indikator: Indeks kepuasan pencari keadilan

Tahun	Responden	Jml Puas	Realisasi	Target	Capaian
2020	0	0	80.66%	90.00%	89.62%
2021	354	312	88.12%	84.00%	104.90%
2022	240	215	89.46%	85.00%	105.25%
2023	285	276	96.66%	88.00%	109.84%
2024	309	293	94.75%	90.00%	105.28%

Sumber: Laporan SKM dan LKjIP 2020-2024

5. Indikator: Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu

Tahun	Putusan	Dismpkan tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
2020	916	849	92.69%	90.00%	102.98%
2021	924	924	100.00%	100.00%	100.00%

2022	885	885	100.00%	100.00%	100.00%
2023	842	842	100.00%	100.00%	100.00%
2024	812	812	100.00%	100.00%	100.00%

6. Indikator: Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun	Perkara Mediasi	Berhasil	Realisasi	Target	Capaian
2020	191	16	8.38%	15.00%	55.85%
2021	149	9	6.04%	10.00%	60.40%
2022	176	11	6.25%	6.00%	104.17%
2023	162	55	33.95%	7.00%	485.01%
2024	129	52	40.31%	10.00%	403.10%

Sumber: LIPA 12 dan LKjIP 2020-2024

7. Indikator: Perkara prodeo yang ditangani

Tahun	Perkara Prodeo	Diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2020	25	14	56.00%	100.00%	56.00%
2021	30	26	86.67%	100.00%	86.67%
2022	30	30	100.00%	100.00%	100.00%
2023	30	30	100.00%	100.00%	100.00%
2024	30	30	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: LIPA 15 dan LKjIP 2020-2024

8. Indikator: Pelayanan Posbakum

Tahun	Jml layanan	Dilayani Posbakum	Realisasi	Target	Capaian
2020	624	711	113.94%	100.00%	113.94%
2021	624	704	112.82%	100.00%	112.82%
2022	900	955	106.11%	100.00%	106.11%
2023	900	902	100.22%	100.00%	100.22%
2024	914	1004	109.85%	100.00%	109.85%

Sumber: LIPA 16 dan LKjIP 2020-2024

9. Indikator: putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Tahun	diajk eksekusi	Ditindaklanjuti	Realisasi	Target	Capaian
2020	916	901	98.36%	95.00%	103.54%
2021	924	908	98.27%	95.00%	103.44%
2022	885	872	98.53%	98.00%	100.54%
2023	2	2	100.00%	98.00%	102.04%
2024	98	97	98.98%	98.00%	101.00%

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I-III TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	99,01%	101.03%
		2. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	98,00%	98,51%	100.52%
		3. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,00%	99,34%	100,34%
		4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90,00%	94,83%	105,37%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		2. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30,00%	79,63%	265,43%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirka	1. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
		2. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100,00%	107,78%	107,78%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	98,00%	100,00%	102,04%
5.	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	1. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100,00%	100,00%	100,00%
		2. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan	100,00%	100,00%	100,00%

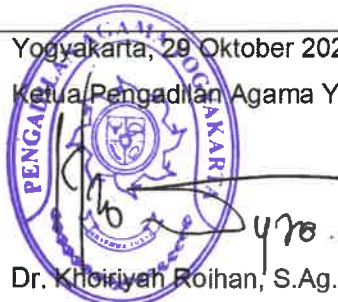
NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP dan meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan Diklat Ketenagateknisan Monitoring penyelesaian perkara melalui rapat kepaniteraan dan koordinasi dengan hakim 	Masih terdapat penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan dikarenakan keragaman perkara	Sosialisasi lebih lanjut mengenai batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan.
1.2.	Meningkatkan kualitas putusan hakim dengan mengikutsertakan hakim dalam berbagai Bimtek dan Diklat	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dipahami bahwa pihak berperkara telah puas dengan putusan hakim, namun hingga saat ini masih terdapat putusan hakim yang diajukan upaya hukum, sehingga diperlukan strategi lebih lanjut untuk mewujudkan putusan hakim yang adil dan seimbang bagi para pihak berperkara.	Mengikutsertakan hakim dalam kegiatan Bimtek ataupun Diklat
1.3.	Meningkatkan kualitas putusan hakim dengan mengikutsertakan hakim dalam berbagai Bimtek dan Diklat	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dipahami bahwa pihak berperkara telah puas dengan putusan hakim, namun hingga saat ini masih terdapat putusan hakim yang diajukan upaya hukum, sehingga diperlukan strategi lebih lanjut untuk mewujudkan putusan hakim yang adil dan seimbang bagi para pihak berperkara.	Mengikutsertakan hakim dalam kegiatan Bimtek ataupun Diklat.
1.4.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan survey kepuasan Masyarakat dan survey indeks persepsi anti korupsi serta survey persepsi kualitas pelayanan melalui https://survei.badilag.net/ Monitoring hasil survey secara berkala 	Survey kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam penilaian satuan kerja, survey ini juga dapat digunakan sebagai perbaikan kualitas layanan yang diberikan oleh pengadilan. Namun hingga saat ini, masih terdapat hasil survey	Meningkatkan sosialisasi mengenai pengisian Survey Kepuasan masyarakat baik kepada masyarakat, dan pegawai peradilan

NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		masyarakat yang masih rendah hal ini tertuang dalam salah satu indikator yaitu kesesuaian produk layanan antara SOP dengan hasil yang diberikan.	
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara dengan meningkatkan penggunaan aplikasi yang mendukung percepatan penyelesaian perkara. • Monitoring upload Salinan putusan 	Penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dilakukan secara tepat waktu, hal ini dapat digunakan untuk meminimalisir adanya minutas putusan yang melebihi batas waktu..	Meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi pendukung persidangan guna menghasilkan penyelesaian perkara yang efektif dan tepat waktu.
2.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan yang mengatur tentang mediasi • Memonitoring pelaksanaan mediator secara berkala • Memberikan penghargaan terhadap mediator non hakim yang berkinerja terbaik (keberhasilan mediasi paling banyak) 	Penyelesaian perkara dengan mediasi telah diupayakan semaksimal mungkin dengan hadirnya mediator non-hakim, hal ini mendukung peningkatan penyelesaian perkara dengan cara non litigasi.	Meningkatkan informasi digital mengenai mediasi, sehingga pihak mudah memahami dan mudah dimengerti.
3.1.	Memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	Dalam memenuhi hak dan kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan, telah diberikan sehingga hak dan kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu terpenuhi.	Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban administrasi kepada masyarakat kurang mampu mengenai hak mereka ketika berperkara di pengadilan
3.2.	Memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat pencari keadilan dengan tidak membedakan masyarakat pencari keadilan.	Dalam memenuhi hak dan kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan, telah diberikan sehingga hak dan kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu terpenuhi.	Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban administrasi kepada masyarakat kurang mampu mengenai hak mereka ketika berperkara di pengadilan

NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu terpenuhi.	berperkara di pengadilan
4.1.	Memeriksa kelengkapan permohonan eksekusi dan menindaklanjutinya	Terhadap perkara yang dilakukan eksekusi telah dilakukan secara maksimal sehingga hak pihak berperkara telah mampu terpenuhi terutama mengenai pelaksanaan eksekusi putusan perdata agama.	Sosialisasi lebih lanjut mengenai sita eksekusi, jaminan, dan output lainnya mengenai eksekusi.
5.1.	Meningkatkan kinerja kepaniteraan dengan mengikutsertakan aparatur kepaniteraan dalam berbagai Bimtek dan Diklat	Keterbatasan penyelenggara diklat di lingkungan Mahkamah Agung dan kuota peserta diklat sehingga diklat tidak merata	Menginventarisir kebutuhan diklat masing-masing bagian dan jabatan Mengusulkan ke Badan Diklat atau Biro Kepegawaian Mengikuti diklat yang diadakan selain dari MA atas inisiatif sendiri
5.2.	Meningkatkan kinerja sekretariat dengan mengikutsertakan aparatur sekretariat dalam berbagai Bimtek dan Diklat	Keterbatasan penyelenggara diklat di lingkungan Mahkamah Agung dan kuota peserta diklat sehingga diklat tidak merata	Menginventarisir kebutuhan diklat masing-masing bagian dan jabatan Mengusulkan ke Badan Diklat atau Biro Kepegawaian Mengikuti diklat yang diadakan selain dari MA atas inisiatif sendiri

Yogyakarta, 29 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2025
PA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Stratefis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari s.d Maret 2025					Perhitungan	
				Input	Jan	Feb	Mar	Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	98.00	Jumlah Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan	41	75	52	168	98.21%	100.22%
		Jumlah Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu		40	73	52	165			
		Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98.00	Jumlah perkara yang diselesaikan	41	75	52	168	97.62%	99.61%
		Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding		40	73	51	164			
		Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99.00	Jumlah perkara yang diselesaikan	41	75	52	168	99.40%	100.41%
		Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		41	74	52	167			
Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90.00	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97.00%			97.00%	107.78%			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	100.00	Jumlah Putusan perkara perdata agama	41	75	52	168	100.00%	100.00%
		Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu		41	75	52	168			
			30.00	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	10	14	11	35	82.86%	276.19%

		Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	8	7	14	29		
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100.00	Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	4	18	5	27	100.00%	100.00%
				Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	4	18	5	27		
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100.00	Jumlah permohonan layanan hukum	110	100	55	265	111.70%	111.70%
				Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	133	95	68	296		
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata Agama yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	98.00	Jumlah putusan perkara perdata agama yang diajukan permohonan eksekusi	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				Jumlah putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0	0	0	0		

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan laporan perkara bulan Januari- Maret 2025

Yogyakarta, 11 April 2025

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2025
PA YOGYAKARTA

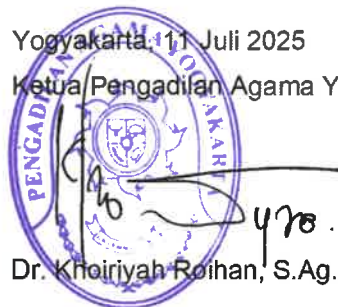
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April s.d Juni 2025					Perhitungan	
				Input	Apr	Mei	Juni	Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	98.00	Jumlah Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan	48	76	66	190	99.47%	101.50%
				Jumlah Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	48	76	65	189		
		Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98.00	Jumlah perkara yang diselesaikan	48	76	66	190	98.42%	100.43%
				Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	46	76	65	187		
		Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99.00	Jumlah perkara yang diselesaikan	48	76	66	190	98.95%	99.95%
				Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	47	76	65	188		
Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90.00	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92.25%			92.25%	102.50%			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	100.00	Jumlah Putusan perkara perdata agama	48	76	66	190	100.00%	100.00%
				Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu	48	76	66	190		
		Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30.00	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	11	13	15	39	82.05%	273.50%
				Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	10	7	15	32		
3			100.00	Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	1	2	0	3	100.00%	100.00%

	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan		Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	1	2	0	3		
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100.00	Jumlah permohonan layanan hukum	85	110	60	255	107.06%	107.06%
				Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	82	102	89	273		
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata Agama yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	98.00	Jumlah putusan perkara perdata agama yang diajukan permohonan eksekusi	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				Jumlah putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0	0	0	0		

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan laporan perkara bulan April- Juni 2025

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

**PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III 2025
PA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April s.d Juni 2025						Perhitungan	
				Input	Jul	Agust	Sep	Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	98.00	Jumlah Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan	88	71	87	246	99.19%	101.21%	
				Jumlah Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	87	71	86	244			
		Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98.00	Jumlah perkara yang diselesaikan	88	71	87	246	99.19%	101.21%	
				Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86	71	87	244			
		Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99.00	Jumlah perkara yang diselesaikan	88	71	87	246	99.59%	100.60%	
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	88			70	87	245					
Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90.00	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95.25%			95.25%	105.83				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	100.00	Jumlah Putusan perkara perdata agama	88	71	87	246	100.00%	100.00%	
				Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu	88	71	87	246			

		Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30.00	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	11	9	14	34	73.53%	245.10%
				Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	10	3	12	25		
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100.00	Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0		
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100.00	Jumlah permohonan layanan hukum	90	100	74	264	104.55%	104.55%
		Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	93	83	276				
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata Agama yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	98.00	Jumlah putusan perkara perdata agama yang diajukan permohonan eksekusi	1	0	0	1	100.00%	102.04%
				Jumlah putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	1	0	0	1		

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan laporan perkara bulan Juli – September 2025



Yogyakarta, 29 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I/II/III/IV TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

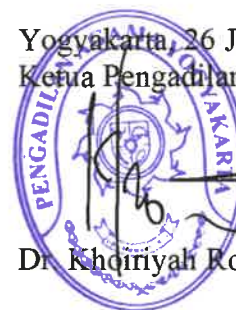
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	99,15%	102,21%
		1.2.Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100,00%	100,00%	100,00%
		1.3.Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98,00%	100,00%	102,04%
		1.4.Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100,00%	100,00%	100,00%
		1.5.Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68,00%	100,00%	147,06%
		1.6.Persentase perkara yang menggunakan e-court	95,00%	100,00%	105,26%
		1.7.Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41,00%	76,55%	186,71%
		1.8.Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97,00%	100,00%	103,09%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	3,83	103,51%
		2.2. Persentase pengguna bantuan hukum	100,00%	117,72%	117,72%
3.	Terwujud manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71,00%	83,40%	117,46%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,00%	96,36%	103,61%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75,00%	80,10%	106,80%
		3.4. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00	3,675	122,50%

NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1.	Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP	Masih terdapat penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan dikarenakan keragaman perkara	Sosialisasi lebih lanjut mengenai batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SOP dan SEMA.
1.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara dengan meningkatkan penggunaan aplikasi yang mendukung percepatan penyelesaian perkara. • Monitoring upload Salinan putusan 	Penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dilakukan secara tepat waktu, hal ini dapat digunakan untuk meminimalisir adanya minutasasi putusan yang melebihi batas waktu.	Meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi pendukung persidangan guna menghasilkan penyelesaian perkara yang efektif dan tepat waktu.
1.3.	Menyampaikan pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu	Penyampaian petikan/amar putusan pada Tingkat Banding, Kasasi dan PK kepada pihak telah mampu diserahkan secara tepat waktu, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pihak berperkara mampu dilaksanakan secara utuh, dan melampaui target yang telah ditetapkan.	Memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pengiriman berkas Banding, Kasasi dan PK dan monitoring pengiriman secara tepat waktu
1.4.	Menggunggah putusan di direktori putusan (<i>one day publish</i>)	Penyampaian putusan pada laman direktori putusan, merupakan pemenuhan hak bagi pihak berperkara, sehingga informasi mengenai putusan perkara tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat, hal ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.	Monitoring harian terhadap pengunggahan putusan direktori putusan.
1.5.	Memeriksa kelengkapan permohonan eksekusi dan menindaklanjutinya	Penyelesaian permohonan eksekusi terhadap putusan telah dilaksanakan melebihi dengan target yang ditetapkan, hal ini mencerminkan bahwa setiap hak pihak berperkara mampu dilaksanakan dengan baik oleh pengadilan.	Sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi terkait mengenai sita eksekusi, jaminan, dan output lainnya mengenai eksekusi.
1.6.	Mewajibkan berperkara secara ecourt	Penggunaan ecourt dalam perkara erdata agama telah dilakukan secara optimal, sehingga sudah tidak terdapat perkara yang didaftarkan secara manual.	Mensosialisasikan lebih lanjut mengenai penggunaan ecourt baik kepada pihak berperkara dan pihak internal peradilan, guna mengefektifkan persidangan.

NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.7.	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peraturan yang mengatur tentang mediasi Memonitoring pelaksanaan mediator secara berkala Memberikan penghargaan terhadap mediator non hakim yang berkinerja terbaik (keberhasilan mediasi paling banyak)	Proses perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi telah melebihi target yang dirumuskan, namun tetap harus dioptimalkan dengan strategi atau Upaya untuk mensosialisasikan mengenai mediasi kepada pihak yang berperkara.	Meningkatkan informasi digital mengenai mediasi, sehingga pihak mudah memahami dan mudah dimengerti.
1.8.	Memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	Dalam memenuhi hak dan kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan, telah diberikan sehingga hak dan kewajiban administrasi kepada Masyarakat kurang mampu terpenuhi.	Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban administrasi kepada masyarakat kurang mampu mengenai hak mereka ketika berperkara di pengadilan
2.1.	Melakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadilan	Untuk meningkatkan kualitas layanan di Pengadilan Agama Yogyakarta, setiap pihak yang berperkara diperkenankan untuk mengisi survey kepuasan Masyarakat yang indeks akhir penilaian sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas layanan.	Meningkatkan sosialisasi mengenai pengisian Survey Kepuasan masyarakat baik kepada masyarakat, dan pegawai peradilan
2.2.	Memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat pencari keadilan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat pencari keadilan.	Dalam pemberian layanan kepada Masyarakat kurang mampu atau terpinggirkan sudah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga yang terealisasikan sudah	Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban administrasi kepada masyarakat kurang mampu mengenai hak mereka ketika berperkara di pengadilan
3.1.	<ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir dan mengupdate data Pendidikan, pelatihan, SKP dan kenaikan pangkat Mengusulkan izin belajar, usulan diklat dan kenaikan pangkat 	Keterbatasan penyelenggara diklat di lingkungan Mahkamah Agung dan kuota peserta diklat sehingga diklat tidak merata pengikutsertaannya.	Menginventarisir kebutuhan diklat masing-masing bagian dan jabatan Mengusulkan ke Badan Diklat atau Biro Kepegawaian Mengikuti diklat yang diadakan selain dari MA atas inisiatif sendiri
3.2.	<ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan anggaran rutin 	Adanya efisiensi anggaran dari Pusat karena keadaan ekonomi global berakibat pada keterbatasan	Meminimalisir belanja yang tidak terencana, mengurangi intensitas revisi

NO	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<ul style="list-style-type: none"> Menyesioan rencana penarikan dana Memonitoring penyerapan dan rencana Melaporkan progress fisik dan data kontrak tepat waktu 	dana pemeliharaan dan adanya pengeluaran diluar rencana sehingga merubah perencanaan dan berakibat pada deviasi halaman 3 DIPA	POK dan skala prioritas kegiatan
3.3.	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan kebutuhan riil Monitoring dan menyesuaikan rencana dan pelaksanaan (RPD) Mensosialisasikan DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan riil Usulan belum mengakomodir kebutuhan tiap bagian Perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran mengakibatkan tidak tercapainya output Belanja yang tidak terencana sehingga terjadinya deviasi halaman 3 DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisir kebutuhan/usulan dari masing-masing bagian Monev anggaran dilakukan secara berkala untuk mengambil keputusan revisi anggaran maupun output jika tidak dimungkinkan dapat tercapai Berkoordinasi dengan pengelola anggaran (KPA, PPK dan Bendahara) untuk meminimalisir deviasi halaman 3 DIPA
3.4.	<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan BMN Menyusun laporan BMN dan RKBMN Membuat laporan Wasdal Melakukan klasifikasi dan penghapusan BMN jika diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran pemeliharaan yang terbatas sehingga asset cepat rusak Terdapat asset yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan kondisi rusak 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan anggaran pemeliharaan sesuai kebutuhan riil dan data BMN Menginventarisir dan mengklasifikasikan BMN serta mengusulkan untuk penghapusan

Yogyakarta, 26 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Dr. Khairiyah Roihan, S.Ag., M.H.

Lampiran Monitoring dan Evaluasi IKU 2025 (revisi) Triwulan I – IV Tahun 2025

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2025 (revisi)
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Jan s.d Mar 2025					Perhitungan	
				Input	Jan	Feb	Mar	Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	97.00	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	40	73	52	165	98.21%	101.25%
				Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	41	75	52	168		
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100.00	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	41	75	52	168	100.00%	100.00%
				Jumlah perkara yang diputus	41	75	52	168		
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98.00	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	0	1	1	2	100.00%	102.04%
				Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju	0	1	1	2		
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100.00	Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	41	75	52	168	100.00%	100.00%
				Jumlah putusan yang telah diminutasi	41	75	52	168		
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68.00	Jumlah permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan	0	0	0	0	0	0
				Jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi	0	0	0	0		
Persentase perkara yang menggunakan e-court	95.00	Jumlah perkara yang diajukan menggunakan e-court	91	73	56	220	100.00%	105.26%		
		Jumlah Perkara yang diajukan	91	73	56	220				

		Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	41.00	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	8	7	14	29	82.86%	202.09%
				Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi	10	14	11	35		
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97.00	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	4	18	5	27	100.00%	103.09%
				Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara	4	18	5	27		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3.70	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.88				3.88	104.86%
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100.00	Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilayani	133	95	68	296	111.70%	111.70%
				Jumlah pemohon layanan bantuan hukum (Posbakum)	110	100	55	265		
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71.00	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93.00	IKPA	100	100	100	100	100.00%	107.53%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75.00	NKPA	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	Indek Pengelola Aset (IPA)	0	0	0	0	0.00%	0.00%



Yogyakarta, 11 April 2025
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Dr. Khoiriyah Roihan S.Ag., M.H.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2025 (revisi)
PA YOGYAKARTA

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April s.d Juni 2025				Perhitungan		
				Input	April	Mei	Juni	Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	97.00	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	48	76	66	190	100.00%	103.09%
				Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	48	76	66	190		
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100.00	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	48	76	66	190	100.00%	100.00%
				Jumlah perkara yang diputus	48	76	66	190		
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98.00	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	2	0	1	3	100.00%	102.04%
				Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju	2	0	1	3		
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100.00	Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	48	76	66	190	100.00%	100.00%
				Jumlah putusan yang telah diminutasi	48	76	66	190		
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68.00	Jumlah permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				Jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi	0	0	0	0		

		Persentase perkara yang menggunakan e-court	95.00	Jumlah perkara yang diajukan menggunakan e-court	48	85	53	186	100.00%	105.26%
				Jumlah Perkara yang diajukan	48	85	53	186		
		Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	41.00	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	7	15	32	82.05%	200.13%
				Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi	11	13	15	39		
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97.00	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	1	2	0	3	100.00%	103.09%
				Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara	1	2	0	3		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3.70	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.69				3.69	99.73%
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100.00	Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilayani	82	102	89	273	107.06%	107.06%
				Jumlah pemohon layanan bantuan hukum (Posbakum)	85	110	60	255		
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71.00	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93.00	IKPA	97.59	98.51	99.50	99.50	99.49%	106.98%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75.00	NKPA	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	Indek Pengelola Aset (IPA)	0	0	0	0	0.00%	0.00%

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III 2025 (revisi)
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Jul s.d Sep 2025					Perhitungan	
				Input	Jul	Agt	Sep	Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	97.00	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	88	71	87	246	100.00%	103.09%
				Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	88	71	87	246		
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100.00	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	88	72	87	247	100.00%	100.00%
				Jumlah perkara yang diputus	88	72	87	247		
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98.00	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	2	1	2	5	100.00%	102.04%
				Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju	2	1	2	5		
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100.00	Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	88	72	87	247	100.00%	100.00%
				Jumlah putusan yang telah diminutasi	88	72	87	247		
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68.00	Jumlah permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan	1	0	0	1	0.00%	0.00%
				Jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi	1	0	0	1		
Persentase perkara yang menggunakan e-court	95.00	Jumlah perkara yang diajukan menggunakan e-court	88	72	87	247	100.00%	105.26%		
		Jumlah Perkara yang diajukan	88	72	87	247				
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	41.00	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	3	12	25	73.53%	179.34%		

				Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi	11	9	14	34		
				Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0	0	0	0	0	0
				Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara	0	0	0	0		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3.70	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.81				3,81	102.97%
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100.00	Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilayani	100	93	83	276	104.55%	104.55%
				Jumlah pemohon layanan bantuan hukum (Posbakum)	90	100	74	264		
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71.00	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93.00	IKPA	98.38	98.73	99.09	99.09	99.09%	106.55%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75.00	NKPA	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	Indek Pengelola Aset (IPA)	0	0	0	0	0.00%	0.00%



Yogyakarta, 29 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2025 (revisi)
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Okt s.d Des 2025					Perhitungan	
				Input	Okt	Nop	Des	Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Presentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	97.00	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	66	70	84	220	100.46%	103.56%
				Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	66	69	84	219		
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100.00	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	66	70	84	220	100.00%	100.00%
				Jumlah perkara yang diputus	66	70	84	220		
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98.00	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	0	2	3	5	100.00%	102.04%
				Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju	0	2	3	5		
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100.00	Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	66	70	84	220	100.00%	100.00%
				Jumlah putusan yang telah diminutasi	66	70	84	220		
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68.00	Jumlah permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				Jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi	0	0	0	0		
		Persentase perkara yang menggunakan e-court	95.00	Jumlah perkara yang diajukan menggunakan e-court	70	72	45	187	100.00%	105.26%
				Jumlah Perkara yang diajukan	70	72	45	187		
	41.00	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	5	10	25	67.57%	164.80%		

		Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi		Jumlah Perkara yang wajib dilakukan mediasi	16	10	11	37		
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97.00	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara	0	0	0	0		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3.70	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.93				3.93	106.22%
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100.00	Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilayani	87	76	68	231	177.69%	177.69%
				Jumlah pemohon layanan bantuan hukum (Posbakum)	80	50	0	130		
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71.00	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	0	0	83.4	83.4	83.40%	117.46%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93.00	IKPA	100	100	99.87	99.87	96.36%	103.61%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75.00	NKPA	0	0	0	0	80.10%	106.80%
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	Indek Pengelola Aset (IPA)	0	0	0	0	3.675	122.50%

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

LAMPIRAN 5. Pernyataan Telah Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025

LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Pereviu I



Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Pereviu II



Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

LAMPIRAN II
 SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
 TANGGAL : 25 November 2025

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	V
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	V
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	V
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	V
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	V
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	V
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	V
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	V
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	V
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	V
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	V
		7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	V
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	V

No	Pernyataan	Check list
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	V
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	V
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	V
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	V
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	V
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	V
	9. Jika "Tidak" telah terdapat penjelasan yang	V
	10. IKU dan IK telah SMART	V

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Pereviu I








Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Pereviu II

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

LAMPIRAN 7. SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data

 <p>PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta Homepage: http://pa-yogyakarta.go.id Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net</p>	Kode SOP	SOP/AS/68/2024																
	Nomor SOP	525/KPA.W12-A1/ OT.01.3/V/2024																
	Tanggal Pembuatan	13 Mei 2024																
	Tanggal Revisi	-																
	Tanggal Efektif	13 Mei 2024																
	Disahkan Oleh	 Ketua, Nur Lailah Ahmad, S.H. NIP. 19690313.199403.2.004																
SOP PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA																		
<table border="1"> <tr> <td>DOKUMEN MASTER</td> <td>:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOKUMEN TERKENDALI</td> <td>:</td> <td></td> <td>NO. SALINAN : - - -</td> </tr> <tr> <td>DOKUMEN TIDAK TERKENDALI</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOKUMEN KADALUARSA</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA</i></p>			DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>		DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : - - -	DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			DOKUMEN KADALUARSA	:		
DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>																
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : - - -															
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:																	
DOKUMEN KADALUARSA	:																	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :																	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Informasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. 	<ol style="list-style-type: none"> S2/Sederajat Menguasai Manajemen Peradilan Menguasai Administrasi Persidangan dan Perkara Menguasai Administrasi Kesekretariatan 																	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :																	
<ol style="list-style-type: none"> Seluruh SOP Kesekretariatan dan Kepaniteraan 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkapannya; Internet 																	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :																	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengumpulan dan perbaikan data kinerja untuk LKJIP akan terhambat	<ol style="list-style-type: none"> Kertas Kerja Monitoring dan Perjanjian Kinerja Laporan Perkara Bulanan dan Tahunan 																	

No	Uraian Kinerja	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Ketua	Panitera	Sekretaris	Kasubbag PTIP	Panmud Hukum	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan kertas kerja monitoring perjanjian kinerja/ kertas kerja monitoring sasaran mutu						Kertas kerja Monitoring	10 Menit	Kertas kerja Monitoring	
2.	Mempersiapkan laporan perkara bulanan. Statistik perkara SIPP						Laporan bulanan, SIPP, buku kontrol pengiriman dan Direktori Putusan MARI	60 Menit	Sumber data laporan kinerja	
3.	Menuangkan data kinerja bulanan ke dalam kertas kerja monitoring						Kertas kerja monitoring dan sumber data laporan kinerja	15 Menit	Terisinya kertas kerja monitoring	
4.	Menginput data kinerja pada kertas kerja monitoring ke dalam Laporan Realisasi Bulanan Kinerja melalui Komdanas, mencetak dan menyerahkan kepada Sekretaris	Data Tidak Valid					Kertas kerja monitoring realisasi kinerja bulanan	15 Menit	Upload data kinerja bulanan pada Komdanas	
5.	Memeriksa kertas kerja monitoring dan laporan realisasi kinerja bulanan, jika data sudah valid maka diteruskan kepada Panitera				Data Tidak Valid		Kertas kerja monitoring realisasi kinerja bulanan dan laporan bulanan kinerja Komdanas	10 Menit	Kertas kerja monitoring realisasi kinerja bulanan dan laporan bulanan kinerja Komdanas	
6.	Memeriksa kertas kerja monitoring dan laporan realisasi kinerja bulanan, jika data sudah valid maka dilaporkan kepada Ketua	Data Valid					Kertas Kerja Monitoring realisasi kinerja bulanan dan laporan bulanan kinerja Komdanas	10 Menit	Kertas kerja monitoring realisasi kinerja bulanan dan laporan bulanan kinerja Komdanas	
7.	Menerima laporan realisasi kinerja						Laporan bulanan kinerja Komdanas	15 Menit	Laporan bulanan kinerja Komdanas	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono No.53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

NOTULA

Dasar : Undang-an Nomor 285/KPA.W12-A1/UND.OT1/II/2026 tanggal 18 Februari 2026
Hari : Rabu
Tanggal : 18 Februari 2026
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta
Acara : Reviu LKJIP 2025
Peserta Rapat: Ketua, Wakil Ketua, Tim Reviu, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Nurjannah, Megananda dan Sinduka

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Sekretaris, disampaikan bahwa tahap terakhir dalam penyusunan dokumen SAKIP adalah reviu LKJIP 2025 untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun akurat dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pengantar bahwa Laporan Kinerja ini adalah cerminan hasil capaian kinerja kita selama setahun dan sebagai tolok ukur untuk kinerja kita tahun 2026, sehingga harus dicermati dan menjadi komitmen Bersama untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Pembahasan:

1. IKU tahun 2025 revisi per November 2025, sehingga laporan kerjanya lebih banyak karena penyajian capaian 2 IKU, perbedaan mendasarnya sebelumnya 5 Sastra menjadi 3 Sastra, sebelumnya 11 IKU menjadi 14 IKU, beberapa IKU hilang dan menjadi IK Lainnya seperti prodeo dan Posbakum.
2. Penyampaian gambaran LKJIP tahun 2025; dari 14 indikator terdapat 2 indikator dibawah target nasional IKPA dan NKPA dikarenakan anggaran mediasi eksternal kurang maksimal terserap.
3. Beberapa koreksi disampaikan oleh tim reviu yang disampaikan oleh Ibu Sulistianingtias Wibawanty antara lain:
 - a. Typo penulisan
 - b. Tata penulisan campuran ada kolom seperti majalah dan paragraph, sebaiknya dibuat 1 kolom saja
 - c. Secara keseluruhan laporan kinerja telah memenuhi ceklist reviu dan tindaklanjut LHE SAKIP Tahun 2024 sudah ditindaklanjuti dalam laporan LKJIP 2025

Kesimpulan:

1. Setelah hasil reviu ini ditindaklanjuti, maka surat pernyataan telah direviu akan ditandatangani
2. Hardcopy dokumen SAKIP yang sudah diperbaiki agar dicek Kembali oleh Tim Reviu

Notulen

Nur Asiyah



Mengetahui

Ketua

Khoiriyah Roihan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DOKUMENTASI

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Review LKjIP tahun 2025
Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Review LKJip tahun 2025
Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta

N O.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H	Ketua	
2.	Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.	Wakil Ketua	
3.	Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.	Hakim	
4.	Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H.	Hakim	
5.	Drs. Abdul Adhim AT	Panitera	
6.	Taslim, S.H.	Sekretaris	
7.	Endang Winarni, S.H., M.H.	Panmud Hukum	
8.	Dra. Hj. Lilik Mahsun, S.H., M.H.	Panmud Permohonan	
9.	Dra. Mardhiyah Nur	Panmud Gugatan	
10.	Nur Asiyah, S.E., M.M.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
11.	Verawati Widjaya, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian & Ortala	
12.	Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.	Kasubag Umum & Keu	
13.	Nurjanna Wasahua, S.Kom., M.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	
14.	Megananda Hersayekti Cecriana, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
15.	Sinduka Bayu Pamungkas, A.Md. Pas.	CPNS / Dokumentalis Hukum	

Yogyakarta, 18 Februari 2026
Ketua

Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H
NIP. 197409261999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muja, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 285/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yogyakarta 18 Februari 2026

Yth. Para Pejabat dan Pegawai pada daftar terlampir
di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam acara Review LKJIP tahun 2025 pada
Pengadilan Agama Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Februari 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kota YA
KHOIRIYAH ROIHAN



LAMPIRAN

Surat Undangan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 285/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/II/2026
Tanggal : Yogyakarta 18 Februari 2026

DAFTAR PEJABAT DAN PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Wakil Ketua
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.
5. Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H
6. Panitera Muda
7. Kepala Sub Bagian
8. Nurjanna Wasahua, S.Kom., M.H.
9. Megananda Hersayekti Cecriana, S.H.
10. Sinduka Bayu Pamungkas, A.Md. Pas.

Ketua





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono No.53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

NOTULA

Dasar : Undanguan Nomor 100/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/II/2026 tanggal 22 Januari 2026
Hari : Kamis
Tanggal : 22 Januari 2026
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta
Acara : Penyusunan LKjIP 2025
Peserta Rapat: Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Nurjannah dan Sinduka

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Sekretaris, pembahasan rapat tentang penyusunan LKjIP 2025, selanjutnya secara Teknik penyusunan disampaikan oleh Kasubbag PTIP

Pembahasan:

1. Penyusunan dokumen SAKIP mempedomani surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP:
 - a. Dokumen SAKIP terdiri dari Penetapan IKU, Revisi IKU, Renstra 2025-2029, Revisi Renstra 2025-2029, revisi RKT 2026, Revisi PKT 2025, Revisi Rencana Aksi 2025, Monev Rencana Aksi I-III Tahun 2025, Revisi Monev atas Rencana Aksi Triwulan I-IV Tahun 2025, RKT 2027, PKT 2026, Rencana Aksi Tahun 2026 dan LKjIP 2025;
 - b. Penyusunan LKjIP memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum kata pengantar
 - c. Pada bab II ditambahkan penyampaian capaian kinerja akumulasi triwulan I-III tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025
 - d. Bab III diuraikan sub bab capaian kinerja pengukuran perbulan pada revisi perjanjian kinerja tahun 2025 dan juga dijadikan lampiran serta daklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
2. Penyampaian dokumen SAKIP paling lambat 28 Februari 2026, disampaikan pada:
 - a. Aplikasi e-SAKIP REVIU ke link <https://esr.menpan.go.id/>
 - b. Aplikasi e-SAKIP pada link <https://batara.mahkamahagung.go.id/> dan website

Kesimpulan:

1. Mengingat beberapa ketentuan dalam pembahasan tersebut, maka perlu Kerjasama tim, untuk bagian kepaniteraan penyedia data perkara operator Sinduka dikoordinir Ibu Panmud Hakum dan Panmud Gugatan
2. Penyajian laporan operator LKjIP Ibu Nurjannah dan dikoordinir Kasubbag PTIP
3. Penyelesaian laporan maksimal 2 minggu setelah rapat ini, akan ada pembahasan lagi Bersama tim reviu.

Notulen

Nur Asiyah

Mengetahui
Ketua

Khoiriyah Roihan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DOKUMENTASI

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Penyusunan LKJIP Pengadilan Agama Yogyakarta
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat

Nama Kegiatan : Penyusunan LKJIP Pada Pengadilan Agama Yogyakarta

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Media Center Atas Pengadilan Agama Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., M.H.	Ketua	
2.	Dr. MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.Hum.	Wakil Ketua	
3.	Drs. ABDUL ADHIM AT	Panitera	
4.	TASLIM, S.H.	Sekretaris	
5.	Dra. MARDHIYAH NUR	Panmud Gugatan	
6.	Dra. LILIK MAHSUN, S.H., M.H.	Panmud Permohonan	
7.	ENDANG WINARNI, S.H., M.H.	Panmud Hukum	
8.	NUR ASIYAH, S.E., M.M.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
9.	NURJANNA WASAHUA, S.Kom., M.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	
10.	SINDUKA BAYU PAMUNGKAS, A.Md.Pas.	CPNS / Dokumentalis Hukum	

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Ketua

Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
NIP. 197409261999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 100 /KPA.W12-A1/UND.OT1.6//2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Yth. Para Pegawai pada daftar terlampir
di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam acara Penyusunan LKJIP Pada Pengadilan
Agama Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Januari 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Atas Pengadilan Agama Yogyakarta

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua



9. Lampiran Eviden Screenshot IP ASN, IKPA dan NKPA

IP ASN 2025

MONITORING IPASN SIKEP											TOTAL 1 ITEM	
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	401199 - Pengadilan Agama Yogyakarta	54	30	93,40	100	22,83	30,87	25,00	4,90	-	-	-

IKPA DIPA 01

Kementerian Keuangan

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	030	005	401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,69	100,00	99,87	100%	0,00	99,87
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	10,00	10,00	25,00					
					Nilai Aspek	100,00			99,67		100,00					

IKPA DIPA 04

Kementerian Keuangan

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	030	005	401201 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	Nilai	100,00	100,00	93,19	100,00	100,00	100,00	76,84	62,86	100%	0,00	62,86
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	15,00	18,64	10,00	10,00	19,21					
					Nilai Aspek	100,00			93,30		76,84					

NKPA DIPA 01

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MAHASISWA BUKUM

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 1 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Capaian RO	Penggunaan SBK
1	401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	

Menampilkan 1 sampai 1 dan 1 entri

NKPA DIPA 04

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MAHASISWA BUKUM

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 1 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Capaian RO	Penggunaan SBK
1	401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	60,19	66,92	100,00	0,00	

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN
INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

No	Parameter	Data	Nilai Parameter	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks	
1	2	3	4	5=3/4	6	7=5x6	9=7x8	
1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif								
1.1	Penatausahaan BMN				Bobot 20%	Indeks sebelum bobot	0,8	
1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	Jumlah Transaksi yang Telah di Verifikasi 11	Jumlah transaksi 11	100%	-	Bobot 60%	Indeks sebelum bobot 4	2,4
1.1.2	Penjelasan Telaah Data BMN	Data yang sudah dilakukan telaah atau penjelasan 1	Jumlah data telaah 1	100%	-	Bobot 40%	Indeks sebelum bobot 4	1,6
1.2	Realisasi PNPB dari pengelolaan aset				Bobot 15%		0,45	
1.2.1	Realisasi pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 0	Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 0	0%		Bobot 50%	Indeks sebelum bobot 3	1,5
1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Penggunaan Barang	Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Penggunaan Barang 0	Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN 0	0%		Bobot 50%	Indeks sebelum bobot 3	1,5
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan								
2.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN				Bobot 25%		0,825	
2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Tanggal Terima 30 Juli 2025	Batas Penyampaian 8 Agustus 2025	≤ H-3	Lengkap/ Tidak lengkap 4	Bobot 30%	Indeks sebelum bobot 4	1,2
2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP	Tanggal Terima 12 Februari 2025 15 April 2025 25 Juli 2025	Batas Penyampaian 16 Februari 2025 15 April 2025 25 Juli 2025	3 3 3	Lengkap/ Tidak lengkap 3 3 3	Bobot 30%	Indeks sebelum bobot 3	0,9
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL	Tanggal Terima 16 Januari 2025 3 Juli 2025	Batas Penyampaian 16 Januari 2025 7 Juli 2025	3 4 4	Lengkap/ Tidak lengkap 4 4	Bobot 40%	Indeks sebelum bobot 3	1,2
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif								
3.1	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang ditindak lanjut 1	Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang 1	100%		Bobot 10%	Indeks sebelum bobot 4	0,4
3.2	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir 0	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal 103.475.500	t-0 = 0	(57) -	Bobot 10%	Indeks sebelum bobot 4	0,4
4. Administrasi BMN yang Andal								
4.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2) 4.585	Total Luas Tanah (m2) 4.585	100%		Bobot 10%	Indeks sebelum bobot 4	0,4
4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Total Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP 53.373.110.717	Total Nilai Perolehan BMN 53.373.810.717	100%		Bobot 10%	Indeks sebelum bobot 4	0,4
Nilai IPA							3,675	

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUMLAH SELURUHNYA		10,491,074,000	0	10,229,043,889	151,073,119	10,380,117,008	98.94 %	110,956,992
WA Program Dukungan Manajemen	10,491,074,000	0	10,229,043,889	151,073,119	10,380,117,008	98.94 %	110,956,992	
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	200,500,000	0	200,488,540	0	200,488,540	99.99 %	11,460	
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	200,500,000	0	200,488,540	0	200,488,540	99.99 %	11,460	
EBB.951 Layanan Sarana Internal	138,000,000	0	137,988,540	0	137,988,540	99.99 %	11,460	
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138,000,000	0	137,988,540	0	137,988,540	99.99 %	11,460	
053.0A Fasilitas Perkantoran	138,000,000	0	137,988,540	0	137,988,540	99.99 %	11,460	
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138,000,000	0	137,988,540	0	137,988,540	99.99 %	11,460	
000002. AC 2 PK	60,000,000	0	59,995,500	0	59,995,500	99.99 %	4,500	
000003. AC 1 PK	39,000,000	0	38,997,630	0	38,997,630	99.99 %	2,370	
000004. AC Standing	27,000,000	0	26,996,310	0	26,996,310	99.99 %	3,690	
000091. CCTV	12,000,000	0	11,999,100	0	11,999,100	99.99 %	900	
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	62,500,000	0	62,500,000	0	62,500,000	100.00	0	
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	62,500,000	0	62,500,000	0	62,500,000	100.00	0	
051.0A Renovasi gedung kantor	62,500,000	0	62,500,000	0	62,500,000	100.00	0	
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	62,500,000	0	62,500,000	0	62,500,000	100.00	0	
000001. Pemasangan Pintu Sliding Kaca Otomatis	62,500,000	0	62,500,000	0	62,500,000	100.00	0	
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	10,290,574,000	0	10,028,555,349	151,073,119	10,179,628,468	98.92 %	110,945,532	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,290,274,000	0	10,028,255,349	151,073,119	10,179,328,468	98.92 %	110,945,532	
EBA.962 Layanan Umum	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0	
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0	
051.0A Belanja Barang Ekstrakomptable	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0	
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0	
000080. Lemari Piala	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0	
EBA.994 Layanan Perkantoran	10,289,574,000	0	10,027,555,349	151,073,119	10,178,628,468	98.92 %	110,945,532	
001 Gaji dan Tunjangan	9,118,494,000	0	8,931,374,382	76,327,000	9,007,701,382	98.78 %	110,792,618	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001.0A PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	9,118,494,000	0	8,931,374,382	76,327,000	9,007,701,382	98.78 %	110,792,618
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	3,112,929,000	0	3,111,929,700	0	3,111,929,700	99.97 %	999,300
000005. Belanja Gaji Pokok PNS	2,637,152,000	0	2,636,153,720	0	2,636,153,720	99.96 %	998,280
000006. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	239,865,000	0	239,864,800	0	239,864,800	100.00	200
000007. Belanja Gaji Pokok PNS (THR)	235,912,000	0	235,911,180	0	235,911,180	100.00	820
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	45,000	0	39,641	0	39,641	88.09 %	5,359
000008. Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,000	0	33,891	0	33,891	86.90 %	5,109
000009. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	3,000	0	2,952	0	2,952	98.40 %	48
000010. Belanja Pembulatan Gaji PNS (THR)	3,000	0	2,798	0	2,798	93.27 %	202
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	216,071,000	0	216,068,520	0	216,068,520	100.00	2,480
000011. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	182,965,000	0	182,962,738	0	182,962,738	100.00	2,262
000012. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	16,852,000	0	16,851,980	0	16,851,980	100.00	20
000013. Belanja Tunj. Suami Istri PNS (THR)	16,254,000	0	16,253,802	0	16,253,802	100.00	198
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	55,097,000	0	54,435,828	0	54,435,828	98.80 %	661,172
000014. Belanja Tunj. Anak PNS	46,715,000	0	46,054,920	0	46,054,920	98.59 %	660,080
000015. Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13)	4,219,000	0	4,218,668	0	4,218,668	99.99 %	332
000016. Belanja Tunj. Anak PNS (THR)	4,163,000	0	4,162,240	0	4,162,240	99.98 %	760
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	35,000,000	0	33,840,000	0	33,840,000	96.69 %	1,160,000
000017. Belanja Tunj. Struktural PNS	30,320,000	0	29,160,000	0	29,160,000	96.17 %	1,160,000
000018. Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00	0
000019. Belanja Tunj. Struktural PNS (THR)	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	153,170,000	0	152,689,000	0	152,689,000	99.69 %	481,000
000020. Belanja Tunj. Fungsional PNS	130,704,000	0	130,223,000	0	130,223,000	99.63 %	481,000
000021. Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13)	11,233,000	0	11,233,000	0	11,233,000	100.00	0
000022. Belanja Tunj. Fungsional PNS (THR)	11,233,000	0	11,233,000	0	11,233,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	22,158,000	0	21,261,640	0	21,261,640	95.95 %	896,360
000023. Belanja Tunj., PPh PNS	4,126,000	0	3,230,522	0	3,230,522	78.30 %	895,478

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000024. Belanja Tunj. PPh. PNS (Gaji ke 13)	9,260,000	0	9,259,272	0	9,259,272	99.99 %	728
000025. Belanja Tunj. PPh PNS (THR)	8,772,000	0	8,771,846	0	8,771,846	100.00	154
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	132,223,000	0	132,021,660	0	132,021,660	99.85 %	201,340
000026. Belanja Tunj. Beras PNS	132,223,000	0	132,021,660	0	132,021,660	99.85 %	201,340
511129 Belanja Uang Makan PNS	441,904,000	0	354,186,000	61,929,000	416,115,000	94.16 %	25,789,000
000027. Belanja Uang Makan PNS	441,904,000	0	354,186,000	61,929,000	416,115,000	94.16 %	25,789,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	40,650,000	0	40,190,000	0	40,190,000	98.87 %	460,000
000028. Belanja Tunjangan Umum PNS	34,000,000	0	33,540,000	0	33,540,000	98.65 %	460,000
000029. Belanja Tunj Umum PNS (Gaji ke 13)	3,325,000	0	3,325,000	0	3,325,000	100.00	0
000030. Belanja Tunj. Umum PNS (THR)	3,325,000	0	3,325,000	0	3,325,000	100.00	0
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	777,832,000	0	736,027,309	0	736,027,309	94.63 %	41,804,691
000087. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	568,624,000	0	526,820,881	0	526,820,881	92.65 %	41,803,119
000088. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (Gaji ke 13)	102,283,000	0	102,282,245	0	102,282,245	100.00	755
000089. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (Gaji ke 14)	106,925,000	0	106,924,183	0	106,924,183	100.00	817
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,954,300,000	0	3,920,700,000	0	3,920,700,000	99.15 %	33,600,000
000084. Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	3,346,300,000	0	3,312,700,000	0	3,312,700,000	99.00 %	33,600,000
000085. Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara (Gaji ke 13)	304,900,000	0	304,900,000	0	304,900,000	100.00	0
000086. Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara (Gaji ke 14)	303,100,000	0	303,100,000	0	303,100,000	100.00	0
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	115,000,000	0	114,302,000	0	114,302,000	99.39 %	698,000
000099. Belanja Gaji PPPK	115,000,000	0	114,302,000	0	114,302,000	99.39 %	698,000
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15,000	0	2,276	0	2,276	15.17 %	12,724
000100. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15,000	0	2,276	0	2,276	15.17 %	12,724
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,000,000	0	9,144,160	0	9,144,160	91.44 %	855,840
000101. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,000,000	0	9,144,160	0	9,144,160	91.44 %	855,840
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,000,000	0	2,743,248	0	2,743,248	91.44 %	256,752
000102. Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,000,000	0	2,743,248	0	2,743,248	91.44 %	256,752

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000103. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,000,000	0	8,690,400	0	8,690,400	96.56 %	309,600
000104. Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,000,000	0	8,690,400	0	8,690,400	96.56 %	309,600
511628 Belanja Uang Makan PPPK	31,600,000	0	15,803,000	14,398,000	30,201,000	95.57 %	1,399,000
000105. Belanja Uang Makan PPPK	31,600,000	0	15,803,000	14,398,000	30,201,000	95.57 %	1,399,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,000,000	0	7,300,000	0	7,300,000	91.25 %	700,000
000106. Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,000,000	0	7,300,000	0	7,300,000	91.25 %	700,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,171,080,000	0	1,096,180,967	74,746,119	1,170,927,086	99.99 %	152,914
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	324,353,000	0	313,501,665	10,823,750	324,325,415	99.99 %	27,585
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	294,407,000	0	285,786,915	8,592,500	294,379,415	99.99 %	27,585
000032. Langganan Surat kabar/Berita/majalah	990,000	0	900,000	90,000	990,000	100.00	0
000033. Air Minum / Galon	11,856,000	0	10,992,000	860,000	11,852,000	99.97 %	4,000
000034. Penjilidan dan Percetakan	7,440,000	0	4,449,565	2,990,000	7,439,565	99.99 %	435
000035. Restribusi dan biaya angkut sampah	5,844,000	0	5,390,000	450,000	5,840,000	99.93 %	4,000
000037. Jamuan Tamu	1,530,000	0	1,516,400	0	1,516,400	99.11 %	13,600
000038. Honor Pengemudi (2 Org x 8 Bln)	38,800,000	0	38,800,000	0	38,800,000	100.00	0
000039. THR Pengemudi (2 Org x 1 Bln)	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	100.00	0
000040. Honor Pramubakti (5 Org x 8 Bln)	88,200,000	0	88,200,000	0	88,200,000	100.00	0
000041. THR Pramubakti (5 Org x 1 Bln)	11,025,000	0	11,025,000	0	11,025,000	100.00	0
000042. Honor Satpam (4 Org x 12 Bln)	87,300,000	0	84,875,000	2,425,000	87,300,000	100.00	0
000043. THR Satpam (4 Org x 1 Bln)	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000	100.00	0
000082. Keperluan Perkantoran Lainnya	19,480,000	0	18,958,450	520,000	19,478,450	99.99 %	1,550
000083. Pajak BBM	3,756,000	0	3,756,000	0	3,756,000	100.00	0
000090. e-Toll	3,636,000	0	2,374,500	1,257,500	3,632,000	99.89 %	4,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,946,000	0	27,714,750	2,231,250	29,946,000	100.00	0
000044. Kebutuhan sehari-hari Perkantoran (46 ORG x 1	29,946,000	0	27,714,750	2,231,250	29,946,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
THN)	29,946,000	0	27,714,750	2,231,250			0
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	193,245,000	0	161,122,322	32,106,414	193,228,736	99.99 %	16,264
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	192,015,000	0	160,000,000	32,000,000	192,000,000	99.99 %	15,000
000045. Langganan Internet	192,000,000	0	160,000,000	32,000,000	192,000,000	100.00	0
000046. Licensi Vidio Confrence	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42,000	0	23,500	18,000	41,500	98.81 %	500
000047. Biaya Pengiriman Surat Dinas	42,000	0	23,500	18,000	41,500	98.81 %	500
522112 Belanja Langganan Telepon	1,188,000	0	1,098,822	88,414	1,187,236	99.94 %	764
000048. Langganan Telepon	1,188,000	0	1,098,822	88,414	1,187,236	99.94 %	764
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	240,762,000	0	233,936,310	6,795,000	240,731,310	99.99 %	30,690
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235,578,000	0	228,753,310	6,795,000	235,548,310	99.99 %	29,690
000049. Pemeliharaan Gedung Kantor	197,584,000	0	194,261,310	3,295,000	197,556,310	99.99 %	27,690
000050. Pemeliharaan Halaman Kantor	16,958,000	0	13,458,000	3,500,000	16,958,000	100.00	0
000094. Pemeliharaan Pagar	21,036,000	0	21,034,000	0	21,034,000	99.99 %	2,000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,184,000	0	5,183,000	0	5,183,000	99.98 %	1,000
000051. Pemeliharaan Rumah Dinas	5,184,000	0	5,183,000	0	5,183,000	99.98 %	1,000
002.0D PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	166,829,000	0	151,731,590	15,050,955	166,782,545	99.97 %	46,455
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166,829,000	0	151,731,590	15,050,955	166,782,545	99.97 %	46,455
000052. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	100,916,000	0	89,413,229	11,498,504	100,911,733	100.00	4,267
000053. Pemeliharaan Inventaris	1,840,000	0	1,831,800	0	1,831,800	99.55 %	8,200
000054. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	2,580,000	0	2,580,000	0	2,580,000	100.00	0
000055. Pemeliharaan PC	5,016,000	0	4,987,000	0	4,987,000	99.42 %	29,000
000056. Pemeliharaan Laptop/Netbook	4,340,000	0	4,340,000	0	4,340,000	100.00	0
000057. Pemeliharaan Printer	970,000	0	368,300	600,000	968,300	99.82 %	1,700
000058. Pemeliharaan AC Split	16,710,000	0	16,707,500	0	16,707,500	99.99 %	2,500
000059. Pemeliharaan Genzet	5,575,000	0	5,575,000	0	5,575,000	100.00	0
000060. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Sewa)	26,332,000	0	23,878,761	2,452,451	26,331,212	100.00	788

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000061. Bahan Bakar Genzet	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
000095. Pemeliharaan Televisi	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000107. APAR	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	100.00	0
002.0E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL SATKER	95,848,000	0	85,878,000	9,970,000	95,848,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	36,028,000	0	36,028,000	0	36,028,000	100.00	0
000062. Pakaian Dinas Hakim (14 ORG x 1 STEL)	10,976,000	0	10,976,000	0	10,976,000	100.00	0
000063. Pakaian Dinas CPNS (3 ORG x 1 STEL)	2,352,000	0	2,352,000	0	2,352,000	100.00	0
000064. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (33 ORG x 1 STEL)	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	100.00	0
000065. Pakaian Kerja Satpam (4 ORG x 1 STEL)	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	100.00	0
000066. Pakaian Kerja Pramubakti dan Pengemudi (7 ORG x 1 STEL)	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59,820,000	0	49,850,000	9,970,000	59,820,000	100.00	0
000067. Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 ORG x 12 BLN)	13,620,000	0	11,350,000	2,270,000	13,620,000	100.00	0
000068. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 ORG x 12 BLN)	17,400,000	0	14,500,000	2,900,000	17,400,000	100.00	0
000069. Honor Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (1 ORG x 12 BLN)	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
000070. Honor Bendahara Pengeluaran	6,240,000	0	5,200,000	1,040,000	6,240,000	100.00	0
000071. Honor Staf Pengelola Anggaran (2 ORG x 12 BLN)	9,360,000	0	7,800,000	1,560,000	9,360,000	100.00	0
000072. Honor Pengelola PNBPN	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	100.00	0
002.0F BELANJA SEWA	19,000	0	0	0	0	0.00 %	19,000
522141 Belanja Sewa	19,000	0	0	0	0	0.00 %	19,000
000073. Sewa Web Hosting	19,000	0	0	0	0	0.00 %	19,000
002.0G RAPAT KOORDINASI	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000074. Uang Harian (1 Org x 1 Keg)	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
002.0H KONSULTASI KE TINGKAT PUSAT	3,632,000	0	3,631,080	0	3,631,080	99.97 %	920
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,632,000	0	3,631,080	0	3,631,080	99.97 %	920

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401199 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000075. Uang Harian (1 Org x 2 Hari)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000076. Tiket PP (1 Org x 1 Keg)	1,357,000	0	1,356,080	0	1,356,080	99.93 %	920
000077. Penginapan (1 Org x 2 Hari)	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000	100.00	0
002.0I KONSULTASI KE TINGKAT BANDING	2,012,000	0	2,000,000	0	2,000,000	99.40 %	12,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,012,000	0	2,000,000	0	2,000,000	99.40 %	12,000
000078. Uang Harian (2 Org x 5 Keg)	2,012,000	0	2,000,000	0	2,000,000	99.40 %	12,000
002.0J Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	144,180,000	0	144,180,000	0	144,180,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	144,180,000	0	144,180,000	0	144,180,000	100.00	0
000079. Bantuan Sewa Rumah Dinas	144,180,000	0	144,180,000	0	144,180,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
051.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000081. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 04 Ditjen Badan Peradilan Agama
 Satuan Kerja : 401201 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	103,325,000	0	95,540,000	0	95,540,000	92.47 %	7,785,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	103,325,000	0	95,540,000	0	95,540,000	92.47 %	7,785,000
BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	103,325,000	0	95,540,000	0	95,540,000	92.47 %	7,785,000
BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	3,150,000	0	150,000	0	150,000	4.76 %	3,000,000
BBA.001 Layanan Mediator Eksternal di Pengadilan	3,150,000	0	150,000	0	150,000	4.76 %	3,000,000
051 Mediasi melalui mediator eksternal di pengadilan	3,150,000	0	150,000	0	150,000	4.76 %	3,000,000
051.0A Jasa Mediator Eksternal	3,150,000	0	150,000	0	150,000	4.76 %	3,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	3,150,000	0	150,000	0	150,000	4.76 %	3,000,000
000001. Jasa Mediator Eksternal	3,150,000	0	150,000	0	150,000	4.76 %	3,000,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	91,400,000	0	91,400,000	0	91,400,000	100.00	0
QBA.003 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	91,400,000	0	91,400,000	0	91,400,000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	91,400,000	0	91,400,000	0	91,400,000	100.00	0
051.0A Pos Bantuan Hukum	91,400,000	0	91,400,000	0	91,400,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	91,400,000	0	91,400,000	0	91,400,000	100.00	0
000002. Biaya Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum	91,400,000	0	91,400,000	0	91,400,000	100.00	0
QCA Perkara Hukum Perseorangan	8,775,000	0	3,990,000	0	3,990,000	45.47 %	4,785,000
QCA.001 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	8,775,000	0	3,990,000	0	3,990,000	45.47 %	4,785,000
051 Pembebasan Biaya Perkara	8,775,000	0	3,990,000	0	3,990,000	45.47 %	4,785,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	8,775,000	0	3,990,000	0	3,990,000	45.47 %	4,785,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	100.00	0
000005. Panggilan Surat Tercatat (30 Pkr x 4 Pgl)	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0
000003. Biaya Proses	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,785,000	0	0	0	0	0.00 %	4,785,000
000004. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan (1 Org x 4 PGL x 30 PKR)	4,785,000	0	0	0	0	0.00 %	4,785,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.